



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT



RENCANA STRATEGIS 2016 - 2021



Jalan Raden Saleh No. 12 – Padang
Telp.0751-40330, 40331 Fax. 40332
e-mail : dperhubungan01@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Renstra Tahun 2016 – 2021 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Untuk mewujudkan pembangunan di sektor Perhubungan yang efisien dan efektif terdapat berbagai tantangan, peluang dan kendala antara lain berupa perubahan lingkungan strategis yang dinamis seperti globalisasi yang ditandai adanya krisis keuangan, untuk mengantisipasi kondisi tersebut konsep pembangunan sektor Perhubungan perlu terus ditata dan disempurnakan dengan didukung sumber daya yang handal sehingga terwujud pemerataan pembangunan sektor Perhubungan.

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis SKPD Tahun 2016 – 2021 merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis 2016 – 2021 Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat ini disiapkan guna merespon dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis lingkungan strategis baik internal maupun eksternal.

Perencanaan Pembangunan Perhubungan dilakukan terintegrasi antar sektor Transportasi (Darat, Laut, dan Udara) yang mengacu kepada TATRAWIL (Tataran Transportasi Wilayah) dan sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS) yang merupakan pedoman pembangunan Perhubungan secara Nasional serta Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD).

Semoga penyusunan Renstra Tahun 2016 – 2021 ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, amin.

Padang, Januari 2020
Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Sumatera Barat

HERI NOFIARDI, SE, MM
NIP. 19621119 198611 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.....	9
2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	18
2.3 Kinerja Pelayanan	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD	35
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ..	36
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	44
3.3 Telaahan Renstra K/L	49
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	52
3.5 Penentuan Isu-Is Strategis	54
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1 Visi dan Misi SKPD	56
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	56
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD	57
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, I NDIKATOR DAN PENDANAAN INDIKATIF	60
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	93
BAB VII PENUTUP	94

BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ke-III (RPJMD III) 2016-2021. Dokumen perencanaan ini akan dipergunakan sebagai pedoman pembangunan lima tahun kedepan oleh pemerintahan yang terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015.

Sejalan dengan itu, Dinas Perhubungan juga sedang mempersiapkan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021. Baik RPJMD III maupun RENSTRA disusun ditengah-tengah pertumbuhan perekonomian yang sangat dinamis bukan saja oleh karena kondisi perekonomian global yang fluktuatif akibat berbagai krisis, akan tetapi juga karena perekonomian nasional yang relatif stabil namun tetap masih rentan terhadap pengaruh global. RENSTRA adalah dokumen strategis SKPD untuk menjalankan program-program RPJMD di sektornya masing-masing.

Mewujudkan Sumatera Barat yang maju dan sejahtera melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari ketersediaan jaringan dan sistem infrastruktur transportasi yang sanggup mendukungnya. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur transportasi menjadi salah satu bagian terpenting dalam pembangunan Sumatera Barat. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan transportasi dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing, menyerap tenaga kerja, membangkitkan sektor riil, serta membantu mengurangi angka kemiskinan.

Pada kenyataannya kemajuan perekonomian ternyata tidak dibarengi dengan kemajuan pembangunan infrastruktur transportasi yang saat ini sudah sangat serius di hampir semua lini : jalan arteri, jalan tol, jalan kereta api, pelabuhan, bandar udara, dan angkutan penyeberangan. Hal ini menyebabkan daya dukung infrastruktur

Indonesia dalam menopang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkurang serta sangat tidak efisien, dan biaya transportasi membengkak secara tidak proporsional.

Era pemerintahan baru 2016-2021 dengan RPJMD III dan RENSTRA III dipandang sangat strategis sekaligus sangat kritis. Strategis dalam pengertian inilah era dimana infrastruktur, transportasi, dan sistem pelayanan publik yang profesional harus dibangun secara radikal untuk menutupi defisit dan kesenjangan yang sudah berakumulasi selama bertahun-tahun. Ini adalah pemerintahan dengan masa tugas 5 atau 10 tahun kedepan yang mengemban tugas untuk membangun transportasi sesuai dengan amanat Undang-Undang rencana pembangunan jangka panjang. Sementara kritis dalam pengertian bahwa kegagalan untuk membangun infrastruktur transportasi akan membawa dampak negatif yang sangat besar bagi kemajuan perekonomian, daya saing, dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tantangan penyelenggaraan perhubungan semakin bertambah sejalan dengan era globalisasi perdagangan dan harmonisasi pengaturan jasa transportasi. Untuk menjawab hal tersebut maka seluruh jajaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat harus dapat mewujudkan Visi dan Misi serta sasaran penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi antara lain, merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan, melaksanakan tugas teknis operasional bidang perhubungan yang meliputi Teknis Lalu Lintas, Teknis Angkutan dan Terminal, Teknis Sarana dan Teknis Operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Tupoksi di atas perlu disusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal.

Renstra memuat strategi pembangunan transportasi, kebijakan umum, program, kewilayahan dan kerangka ekonomi yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan Renstra melibatkan proses konsultatif atas-bawah (top down) dan bawah atas (bottom up).

Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rencana pembangunan tahunan, yang memuat prioritas pembangunan transportasi. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 ini berfungsi

sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Renstra 2016-2021 akan berisi beberapa kebijakan sektor Perhubungan, yaitu melakukan internalisasi dan integrasi isu-isu strategis lintas sektoral. Proyek strategis yang sudah ada sebelumnya mulai dilaksanakan dalam masa pemerintahan sekarang dan akan terus dilanjutkan dalam pemerintahan 5 tahun ke depan. Beberapa rencana pengembangan sektor transportasi antara lain adalah pengembangan pelabuhan, rencana pengembangan jalur kereta api, pengembangan bandara termasuk bandara perintis, angkutan penyeberangan serta pengembangan transportasi perkotaan.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian dari rencana agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keberadaan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Restra ini, berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KP 430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Sumtra Barat Nomor 23 tahun 2018 tentang Perubahan Rencanan Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai acuan dan pedoman kebijakan, dan strategi pembangunan di bidang Perhubungan di Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun program dan kegiatan untuk mencapai keberhasilan pembangunan bidang Perhubungan pada khususnya dan penyelenggaraan pemerintahan di Sumatera Barat pada tahun 2016-2021 pada umumnya.

Adapun Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah tercapainya kondisi dan harmonisasi perencanaan pembangunan Perhubungan yang holistik, antisipatik dengan sektor lain guna meningkatkan efisiensi pembangunan daerah dan nasional serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dari sektor Perhubungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan gambaran umum penyusunan Rancangan Renstra SKPD.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian dan fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD

1.3 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan ketentuan peraturan lainnya serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan penulisan Renstra, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Mengulas secara ringkas sumberdaya yang dimiliki SKPD, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan dan hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan perlu untuk diatasi melalui Renstra SKPD.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum pembentukan SKPD, struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi

2.2 Sumber Daya

Memuat penjelasan ringkas sumber daya SKPD, mencakup SDM, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD periode sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Memuat isu-isu strategis yang menjadi tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta keselarasan dengan Renstra Kementerian Perhubungan.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD dan faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD terkait Visi, Misi serta Program Kepala Daerah Terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor pendorong pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor pendorong pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Mereview kembali faktor-faktor pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan.

BAB IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat tujuan, sasaran yang ingin dicapai serta langkah-langkah apa yang akan diambil oleh Dinas Perhubungan untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan di dalam tujuan dan sasaran.

4.1 Visi dan Misi

Mengemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD, apa yang ingin dicapai dalam waktu 5 tahun ke depan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah.

4.3 Strategi dan Kebijakan

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan dalam 5 tahun mendatang.

BAB V. RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan untuk jangka waktu 5 tahun ke depan.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII. PENUTUP

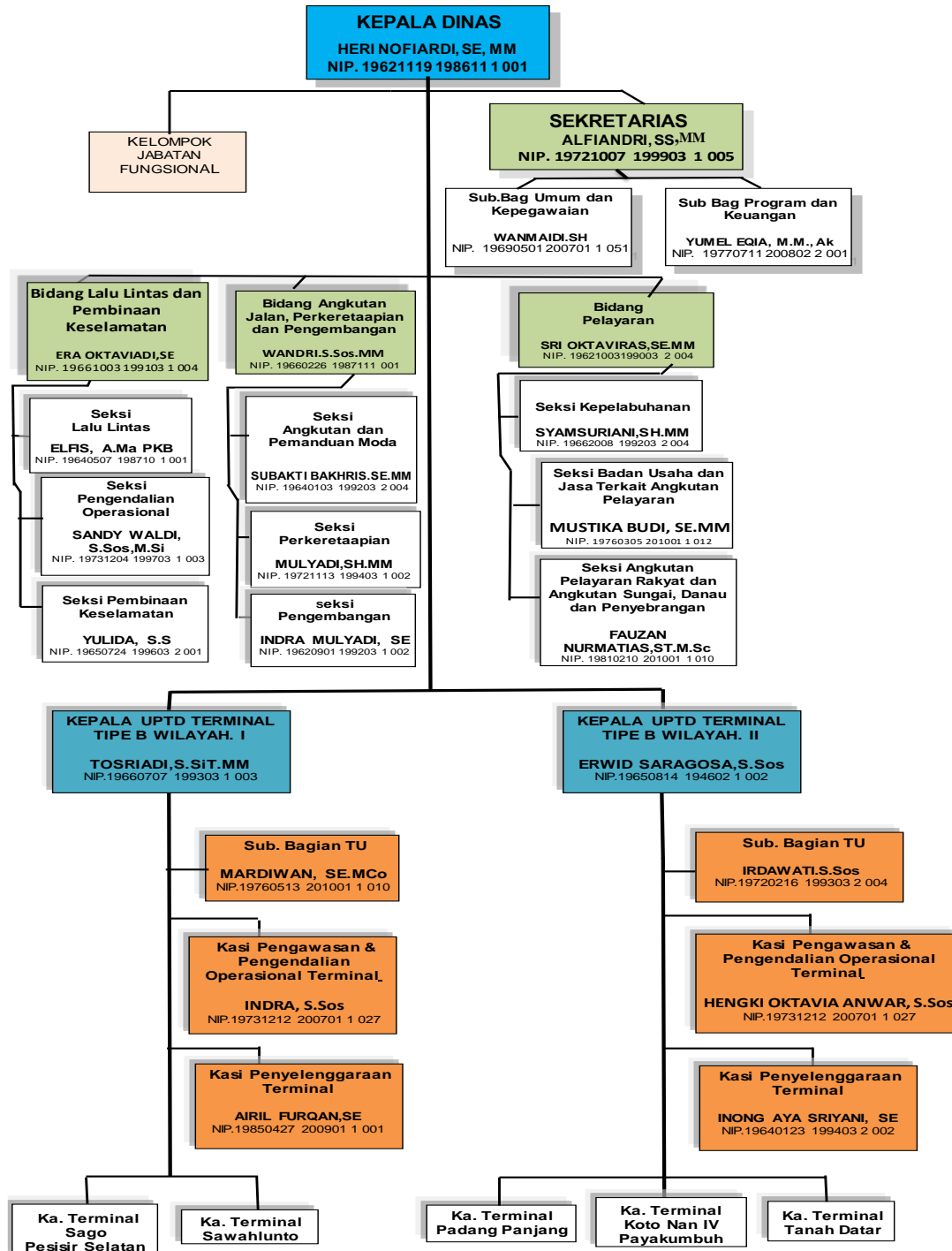
Memuat kesimpulan dan kaidah-kaidah pelaksanaan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan khususnya di bidang transportasi.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Pergub No. 03 tahun 2018 dan Pergub No. 19 tahun 2019, berikut susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT



Berdasarkan Pergub No. 03 tahun 2018 dan Pergub No. 19 tahun 2019, tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dan adalah:

A. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang Perhubungan.

B. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan.
3. Pembinaan dan fasilitasi di bidang Perhubungan Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas.
5. Pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas Angkutan Darat dan Perkeretaapian, Teknik Sarana dan Keselamatan Angkutan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara.
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan.
7. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Kepala Dinas

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
- c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas - atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan;
- d. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Perhubungan;

- e. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk Kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- f. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, LKPJ, dan LPPD Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan ;
- g. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Perhubungan;
- h. Menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Kepala Dinas, membawahi :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan;
- c. Bidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan;
- d. Bidang Pelayaran;
- e. UPT; dan
- f. Kelompok jabatan Fungsional.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas, Ketatausahaan, tatalaksana, humas, protokol, laporan, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut Sekretariat dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawain, dan organisasi, humas, protokol serta urusan rumah tangga dinas.

- b. Sub Bagian Program dan Keuangan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang program dan

keuangan meliputi :koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi pelaporan dan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi, di lingkungan Dinas.

Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. BIDANG ANGKUTAN JALAN, PERKERETAAPIAN DAN PENGEMBANGAN

Mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Lalu Lintas Angkutan Darat dan Perkeretaapian.

Bidang membawahi:

a. Seksi Angkutan dan Pemandu Moda

Mempunyai tugas Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program angkutan, Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi angkutan.

a. Seksi Pengembangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis serta pelaksanaan kegiatan sesuai urusan dan ruang lingkup lalu lintas angkutan darat, lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

b. Seksi Perkeretaapian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan kegiatan urusan dan ruang lingkup perkeretaapian.

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepala Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Darat dan Perkeretaapian.

4. BIDANG LALU LINTAS DAN PEMBINAAN KESELAMATAN

Bidang Keselamatan Angkutan Darat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang teknik sarana dan penanggulangan kecelakaan, pengendalian operasional dan bimbingan keselamatan.

Bidang Keselamatan Angkutan Darat dibantu oleh:

1. Seksi Lalu Lintas

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Seksi Teknik Sarana dan Penanggulangan Kecelakaan meliputi : Pemberian arahan dan bantuan teknis kepada Kabupaten / Kota, pengguna dan penyedia jasa, penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan Provinsi ; penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu Provinsi; pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah Provinsi.

2. Seksi Pengendalian Operasional.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakana teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pengendalian Operasional, meliputi : Pengawasan dan Pengendalian Operasional terhadap Penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan nasional dan jalan provinsi, pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan, pemeriksaan angkutan penumpang umum di Terminal tipe B, pelaksanaan penyidikan pelanggaran Undang – undang lalu lintas dan angkutan jalan, Perda provinsi Bidang LLAJSDP, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, ketentuan pengujian berkala kendaraan bermotor, pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP antar Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi, pengawasan pengoperasian angkutan sungai dan danau, pengawasan pengoperasian angkutan penyeberangan antar Kabupaten / Kota dalam provinsi pada jaringan jalan

provinsi dan pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan SDP.

3. Seksi Pembinaan Keselamatan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Bimbingan Keselamatan, meliputi: pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, penilaian/pemberian reward dan bantuan teknis kepada Kabupaten/Kota, pengguna dan penyedia jasa.

5. BIDANG PELAYARAN

Bidang Perhubungan Laut dan Udara mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Perhubungan Laut dan Udara.

Bidang Perhubungan Laut dibantu oleh:

a. Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran, sesuai urusan yang menjadi kewenangan seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.

b. Seksi Kepelabuhanan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Kepelabuhanan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Kepelabuhanan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan seksi Kepelabuhanan.

c. Seksi Badan Usaha dan Jasa terkait Angkutan Pelayaran

Mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan

usaha angkutan pelayaran serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi bidang Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran.

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayaran.

6. UPTD Terminal

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. UPTD Prasarana perhubungan lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penunjang dinas di bidang penyelenggaraan prasarana perhubungan lalu lintas dan angkutan jalan dalam operasional pengelolaan terminal tipe B.

Wilayah kerja UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi :

- a. UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I berkedudukan di Padang, meliputi terminal Sago Painan dan terminal Sawahlunto.
- b. UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II berkedudukan di Padang Panjang, meliputi terminal Bukit Surungan Padang Panjang, terminal Koto Nan Ampek Payakumbuh dan terminal Piliang Batusangkar.

Susunan organisasi UPTD prasarana perhubungan lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas :

- a. Kepala UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penyelenggaraan Terminal;
- d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional Terminal;

- e. Terminal; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala UPTD :

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan, koordinasi atau sinkronisasi serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah. UPTD Pengelolaan Terminal Tipe B memiliki fungsi :

- Menyusun program pembangunan, peningkatan, pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal penumpang angkutan jalan.
- Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang ketatausahaan;
- Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan terminal
- Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengawasan terminal;
- Melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan terminal penumpang angkutan jalan

Kepala UPTD membawahi :

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Mempunyai tugas :

- Penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang ketatausahaan UPTD pengelolaan terminal tipe B;
- Pengusulan dan penetapan operator operasional, operator sistem tiket dan satuan tugas pengamanan;

- Penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang sarana dan prasarana UPTD pengelolaan terminal tipe B;
 - Penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang operasional UPTD pengelolaan terminal tipe B.
- b. Kepala Seksi Penyelenggaran terminal
- Mempunyai tugas :
- Menyiapkan / melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data operasional terminal;
 - Menyiapkan / melaksanakan bahan – bahan prngaturan operasional terminal;
 - Menyiapkan / melaksanakan bahan – bahan perencanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan terminal;
 - Menyiapkan/melaksanakan pemungutan retribusi pada terminal;
 - Menyiapkan/melaksanakan bahan-bahan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan terminal;
 - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional Terminal
- menyiapkan/melaksanakan bahan-bahan pengawasan operasional terminal;
 - menyiapkan/melaksanakan bahan-bahan kegiatan peningkatan keselamatan angkutan penumpang umum;
 - menyiapkan/melaksanakan kegiatan pengawasan dan penertiban operasional terminal;
 - menyiapkan/melaksanakan fasilitas pengawasan teknis dan laik jalan serta penegakan hukum dan pemantauan kinerja angkutan umum;

- menyiapkan/melaksanakan pemantauan manajemen keselamatan, kinerja pelayanan angkutan orang dan kinerja perusahaan angkutan orang;
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan didukung dengan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Asset serta 1 UPTD untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat

Berikut data Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan berdasarkan golongan ;

Tabel 2.1 Data Pegawai Berdasarkan Golongan (kondisi Desember 2019)

No.	POSISI AWAL 2016	JUMLAH
1	Golongan IV	9
2	Golongan III	53
3	Golongan II	32
4	Golongan I	1
TOTAL		95

Dan berikut merupakan data jumlah pegawai berdasarkan jabatan yang ada pada Dinas Perhubungan

Tabel 2.2 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	BERDASARKAN JABATAN	JUMLAH
1	ESELON II	1
2	ESELON III	4
3	ESELON IV	15
4	STAF/FUNGSIONAL	75
TOTAL		95

Di bawah ini adalah data jumlah pegawai berdasarkan pendidikan terakhir

Tabel 2.3 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S3	-
2	S2	11
3	S1/D4	27
4	D3	11
5	D2/D1/SLTA	46
6	SLTP/SD	-
TOTAL		95

Dan berikut adalah jumlah pegawai berdasarkan bidang yang ada di Dinas Perhubungan

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai pada Masing-masing Bidang

No.	SEKRETARIAT/BIDANG	JUMLAH
1	Sekretariat	28
2	Bidang APP	15
3	Bidang LLPK	15
4	Bidang Pelayaran	10
5	UPTD Terminal Wil.I dan II	27
TOTAL		95

Untuk mendukung pelaksanaan kerja dan pelayanan, Dinas Perhubungan memiliki asset antara lain :

1. Asset berupa Tanah, seperti pada tabel berikut

Tabel 2.5 Data Asset berupa Tanah

JENIS/NAMA BARANG	KODE BARANG	LUAS TANAH (M2)	TAHUN	OBJEK/UNIT KERJA
Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	01.01.11.01.02	897,00	1998	RUMAH DINAS
Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	01.01.11.01.05	1.500,00	1990	MESS/KIP
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.01	2.400,00	1979	JTO (JEMBATAN TIMBANG OTO) PASAMAN TIMUR
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.01	4.535,00	1987	KANTOR DISHUB KOMIMFO KUINI
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.01	2.400,00	1979	UPTD JTO LINTAU

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.0 1	2.400,00	1980	UPTD JTO KUBU KERAMBIL
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.0 1	2.400,00	1979	UPTD JTO SEI LANGSAT
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.0 1	15.628,00	2007	UPTD JTO (UPPKB AIR HAJI)
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.0 1	5.010,00	2003	UPTD JTO KAMANG BARU
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.0 1	2.400,00	1982	UPTD JTO LUBUK BUAYA
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.0 1	7.000,00	1995	KANTOR DISHUB KOMINFO R.SALEH
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.0 1	8.900,00	2006	UPTD JTO TANJUNG BALIK
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.0 1	1.001,00	2005	KANTOR KARANTINA KETAPING
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.0 1	900,00	1987	KANTOR EX.CABDIN SIJUNJUNG
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.0 1	4.000,00	1982	UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR GADUT
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.0 1	2.300,00	1974	EX,KANTOR JEMBATAN TIMBANG OTO PD.HIJAU
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.0 1	5.000,00	1980	UPTD JTO LUBUK LASIH
Tanah Kosong Yang Tidak Diusahakan	01.01.11.05.0 1	1.600,00	1991	TANAH KOSONG DINAS KOMINFO BUKITTINGGI
Tanah Untuk Jalan Kereta Api/Lori	01.01.13.07.0 7	46.176,00	2012	TANAH UNTUK JALAN KA DUKU-BIM TH 2012
Tanah Untuk Jalan Kereta Api/Lori	01.01.13.07.0 7	14.716,00	2013	TANAH UNTUK JALAN KA DUKU-BIM TH 2013
Tanah Untuk Jalan Kereta Api/Lori	01.01.13.07.0 7	3.958,00	2014	TANAH UNTUK JALAN KA DUKU-BIM TH 2014
Tanah Untuk Jalan Kereta Api/Lori	01.01.13.07.0 7	24.877,00	2015	TANAH UNTUK JALAN KA DUKU-BIM TH 2015

2. Asset berupa peralatan dan mesin, seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.6 Data Asset berupa Peralatan dan Mesin

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga
1	Alat-alat besar	8	40.595.500,-
2	Alat-alat angkutan	23	3.857.415.000,-
3	Alat bengkel dan alat ukur	30	1.882.955.313,-
4	Alat kantor dan rumah tangga	1.524	2.993.714.600,-
5	Alat studio dan alat komunikasi	6	486.049.002,-
6	Alat-alat kedokteran	5	7.854.000,-
7	Alat laboratorium	12	204.694.984,-
8	Alat-alat persenjataan/keamanan	41	606.890.000,-
Jumlah			10.080.168.399,-

3. Asset berupa bangunan, seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.7 Data Asset berupa Bangunan

Nama Bangunan	Nama Obyek	Luas Lantai (M2)	Harga	Tahun
Gedung Kantor	UPTD JTO LUBUK LASIH	137,50	81.300.000	2003
Bangunan Kantor	KANTOR DISHUB KOMIMFO KUINI	432,00	82.100.000	1978
Gedung Kantor	KANTOR DISHUB KOMIMFO KUINI	64,00	8.900.000	1978
Gedung Kantor	KANTOR DISHUB KOMIMFO KUINI	126,00	18.700.000	1978
Gedung kantor	KANTOR DISHUB KOMIMFO KUINI	54,00	23.600.000	2000
Gedung Kantor Pusat	KANTOR DISHUB KOMINFO R.SALEH	2.514,00	1.584.800.000	1997
Gedung Kantor	KANTOR DISHUB KOMINFO R.SALEH	72,00	398.897.900	2005
Gedung Kantor	KANTOR DISHUB KOMINFO R.SALEH	60,00	25.300.000	1995
Gedung Kantor	KANTOR DISHUB KOMIMFO KUINI	770,00	732.543.000	1983
Gedung Kantor	UPTD JTO LUBUK BUAYA	156,50	67.310.000	1980
Bangunan Kantor KIP	MESS/KIP	217,00	72.800.000	1990
Gedung Kantor	UPTD JTO KAMANG BARU	193,00	115.700.000	2003
Gedung Kantor	UPTD JTO KUBU KERAMBIL	201,00	20.600.000	1980
Ex Cabdin DLLAJ Sijunjung	KANTOR EX.CABDIN SIJUNJUNG	145,50	38.500.000	1987
Ex UPTD Penimbangan Kend	KANTOR DINAS KOMINFO ANTOKAN	353,00	348.230.000	2003
Gedung Kantor	UPTD JTO TANJUNG BALIK	0,00	2.689.770.842	2006
Gedung Kantor	UPTD JTO (UPPKB AIR HAJI)	0,00	2.679.270.000	2007
Gedung Kantor	JTO (JEMBATAN TIMBANG OTO) PASAMAN TIMUR	226,50	20.552.000	1972
Gedung Kantor	UPTD JTO LINTAU	128,00	10.600.000	1979
Gudang	KANTOR DISHUB KOMIMFO KUINI	98,00	17.200.000	1978
Gudang ATK	KANTOR DISHUB KOMINFO R.SALEH	64,00	29.500.000	1995
Gedung Kantor	UPTD JTO SEI LANGSAT	267,00	160.000.000	2003
Mushalla	UPTD JTO KAMANG BARU	4,00	2.300.000	2003
Mushalla	UPTD JTO SEI LANGSAT	4,00	2.300.000	2003
Mushalla	UPTD JTO LUBUK LASIH	4,00	2.300.000	2003
Gedung Koperasi	KANTOR DISHUB KOMINFO R.SALEH	62,00	36.900.000	1995
Pos Jaga	KANTOR DISHUB KOMINFO R.SALEH	4,00	3.600.000	1995

Garase	KANTOR DISHUB KOMINFO R.SALEH	120,00	44.500.000	1995
Garase Mobil Derek	KANTOR DISHUB KOMIMFO KUINI	96,00	47.925.000	2014
Rumah Dinas	RUMAH DINAS	293,00	478.733.550	2007
Mess	UPTD JTO LUBUK LASIH	125,00	70.800.000	2003

4. Asset tetap lainnya, yaitu peralatan musik dari Korps Musik Dinas Perhubungan dan buku-buku Perundang-undangan seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.8 Data Asset berupa Asset Tetap lainnya

Nama Barang	Jumlah	Harga	Total	Tahun
Set Dram	9,00	25.000,00	225.000,00	2006
Set Dram	4,00	187.500,00	750.000,00	2006
Set Dram	5,00	200.000,00	1.000.000,00	2006
Set Dram	4,00	200.000,00	800.000,00	2006
Tenor Dram	3,00	200.000,00	600.000,00	2006
Tenor Dram	1,00	500.000,00	500.000,00	2006
Maching Trio/Remo	1,00	525.000,00	525.000,00	1984
Maching Trio/Remo	1,00	500.000,00	500.000,00	1984
Tambur	1,00	350.000,00	350.000,00	2006
Tambur	1,00	300.000,00	300.000,00	2006
Tambur	4,00	250.000,00	1.000.000,00	2006
Tympani	1,00	3.800.000,00	3.800.000,00	1984
Bellyra	2,00	410.000,00	820.000,00	1984
Symbel	1,00	95.000,00	95.000,00	1995
Standar set dram	3,00	33.333,33	100.000,00	2006
Standar Not	3,00	75.000,00	225.000,00	2006
Standar Tambur	4,00	30.000,00	120.000,00	2006
Terompet cornet	4,00	212.500,00	850.000,00	2006
Terompet cornet	2,00	414.250,00	828.500,00	2006
Slide trombone	2,00	337.500,00	675.000,00	2006
Slide trombone	2,00	5.809.500,00	11.619.000,00	1995
Value Trombone	1,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1984
Value Trombone	1,00	7.681.500,00	7.681.500,00	1995
Tenor Saxopone	1,00	975.000,00	975.000,00	1995
Tenor Saxopone	1,00	10.440.000,00	10.440.000,00	2006
Clarinet	2,00	220.000,00	440.000,00	1995
Bas cobra	2,00	1.350.000,00	2.700.000,00	1984
Bariton Saxophone	1,00	870.000,00	870.000,00	2006
French Horn	1,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1984
Bariton Horn	3,00	1.000.000,00	3.000.000,00	2006
Bas Horn	2,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2006

Bas Horn	2,00	1.350.000,00	2.700.000,00	2006
Stella	1,00	450.000,00	450.000,00	2006
Dram	3,00	1.870.000,00	5.610.000,00	2011
Tenor Dram	2,00	2.420.000,00	4.840.000,00	2011
Trombone Klep	1,00	6.820.000,00	6.820.000,00	2011
Trompet	1,00	5.830.000,00	5.830.000,00	2011
Sopran	1,00	5.720.000,00	5.720.000,00	2011
Buku Per UU an	18,00	272.222,22	4.900.000,00	2009
Trompet	2,00	7.000.000,00	5.600.000,00	2013
Movies Tenor Saxophone	1,00	2.000.000,00	800.000,00	2013
Movies Alto Saxophone	2,00	2.000.000,00	1.600.000,00	2013
Tenor Horn	1,00	5.000.000,00	2.000.000,00	2013
Simble 16"	2,00	3.000.000,00	2.400.000,00	2013
Clarinet	2,00	5.000.000,00	4.000.000,00	2013
Kulit tambur 28"	2,00	900.000,00	720.000,00	2013
Kulit Tenor	3,00	600.000,00	720.000,00	2013
Kulit Drum	6,00	400.000,00	960.000,00	2013
Clarinet	1,00	8.800.000,00	8.800.000,00	2014
Terompet	1,00	3.829.500,00	0,00	2004
Trombone	1,00	3.937.500,00	0,00	2004
Trombone	1,00	7.681.500,00	0,00	2004
Bass Dram	1,00	5.932.000,00	0,00	2004
Bellira	1,00	4.828.000,00	0,00	2004
Ciembele	1,00	2.138.000,00	0,00	2004
Clarinet	1,00	3.370.000,00	0,00	2004
Movies	1,00	1.593.000,00	0,00	2004
Rit	3,00	540.000,00	0,00	2004
Saxophone	1,00	10.440.000,00	0,00	2004

2.3 Kinerja Pelayanan.

A. Pelayanan Sub Sektor Darat.

Pembangunan Sub Sektor Transportasi Darat meliputi :

1. Peningkatan Fasilitas Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan

Pengadaan fasilitas lalu lintas jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk/pedoman bagi pengguna jalan dalam rangka keselamatan dan mengurangi tingkat kecelakaan.

Kondisi topografis Sumatera Barat memiliki kondisi banyak tanjakan/turunan tajam dan berada di pinggir bukit yang curam. Panjang

jalan nasional dan provinsi mencapai 2.400 km lebih. Jumlah kendaraan bermotor mencapai 2 Juta unit lebih (termasuk sepeda motor)

Untuk pengembangan sarana dan prasarana keselamatan LLAJ, pada tahun 2011 - 2015 khusus pada jalan Provinsi dan jalan Negara telah dilakukan pengadaan dan pemasangan :

Tabel 2.9 Jumlah Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas tahun 2011-2014

No.	Sarana Prasarana Keselamatan	Target	Realisasi
1	Rambu	2.810	2.631
2	Guardrail	3.752	3.830
3	Delineator	3.300	2.678
4	Marka	14.425	16.079
5	Traffic Light	8	3
6	Cermin Tikungan	20	33
7	RPPJ	24	36
8	Warning Light	15	21

Kegiatan sosialisasi/penyuluhan tentang keselamatan lalu lintas baik itu kepada masyarakat pengguna jasa transportasi dan pengemudi kendaraan angkutan umum rutin dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berlalu lintas sesuai aturan yang ditetapkan. Dan juga untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, berikut data kecelakaan lalu lintas di Provinsi Sumatera Barat

Tabel 2.10 Jumlah kecelakaan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 - 2015

No.	TAHUN	JUMLAH KEJADIAN	KORBAN		
			LUKA BERAT	LUKA RINGAN	MENINGGAL DUNIA
1	2011	2.504	1.254	2.515	765
2	2012	3.198	1.638	3.554	685
3	2013	2.625	1.247	3.298	611
4	2014	2.336	1.103	3.022	530
5	2015	2.604	1.117	3.317	563

Dari data diatas terlihat bahwa pada tahun 2011 dan 2012 terjadi peningkatan angka kecelakaan, namun pada tahun 2013 dan 2014 angka kecelakaan telah menurun, karena itu Dinas Perhubungan memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang berkaitan erat dengan keselamatan lalu lintas demi terciptanya lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar.

2. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Masalah keselamatan lalu lintas merupakan tugas utama Dinas Perhubungan, seiring dengan pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor, tingkat kerawanan kecelakaan yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor juga meningkat. Untuk itu setiap kendaraan bermotor dilakukan uji berkala pertama sebagai awal pengecekan kondisi laik jalan kendaraan, berikut data pengujian berkala pertama pada tahun 2010 – 2015

Tabel 2.11 Jumlah Kendaraan yang Telah Dilakukan Uji Berkala Pertama

No.	PENGUJIAN KENDARAN BERMOTOR	TOTAL
1	Tahun 2011	7.893
2	Tahun 2012	7.981
3	Tahun 2013	7.375
4	Tahun 2014	7.445
5	Tahun 2015	5.649

3. Pembangunan dibidang sarana dan prasarana perkeretaapian.

Angkutan Kereta Api merupakan alternatif moda transportasi yang memiliki peranan penting dalam rangka meningkatkan mobilitas orang dan barang dengan biaya lebih murah dan efisien. Angkutan Kereta Api juga dapat menjadi salah satu solusi dalam mengurangi resiko cepatnya kerusakan jalan akibat muatan lebih.

Lintasan Kereta Api Sumatera Barat yang masih aktif saat ini adalah Padang-Sawahlunto, Padang-Pariaman dan Indarung-Teluk Bayur. Dengan terhentinya produksi batubara di Sawahlunto, angkutan barang dengan Kereta Api padang-Sawahlunto terhenti sejak 2003. Namun lintasan ini saat ini dimanfaatkan untuk angkutan wisata dari Padang Panjang-Sawahluno.

Sedangkan lintasan Padang-Pariaman dimanfaatkan untuk angkutan reguler dan angkutan wisata.

Untuk peningkatan dan pengembangan kereta api di Sumatera Barat, seluruhnya mengandalkan pendanaan dari APBN. Realisasi anggaran APBN yang dialokasikan pada tahun 2008 sebesar 30 Miliar, tahun 2009 sebesar 34 Miliar dan telah disetujui pada Satuan 3 APBN tahun 2010 sebesar 50 Miliar. Jadi setiap tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Disamping peningkatan jalur kereta api yang sudah ada, direncanakan pembangunan jalur kereta api baru yaitu : **short cut Padang-Solok** yang merupakan jalur strategis guna mengantisipasi kepadatan lalu lintas Padang – Solok yang kian hari makin meningkat kepadatan jalannya. Untuk perencanaan pembangunan jalur ini Kementerian Perhubungan terus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup karena jalur yang akan dibuat melalui kawasan hutan lindung. Untuk jalur **kereta api Duku-Bandara Internasional Minangkabau** pada awal perencanaan akan diaktifkan pada bulan Agustus 2016, namun setelah dilakukan uji coba ada sedikit kendala maka akan dimundurkan pada bulan Januari 2017.

Untuk mendukung aksesibilitas Bandara Internasional Minangkabau, direncanakan pembangunan Jalan Kereta Api Bandara, dengan panjang rel $\pm 4,2$ km dari jalan kereta api eksisting (Duku – Bandara)

Tahapan yang telah dilaksanakan :

- Studi Kelayakan Tahun 2006
- Penyusunan AMDAL Tahun 2010
- Penyusunan DED Tahun 2010
- Pembebasan Lahan Kereta Api Bandara (DUKU – BIM) Tahun 2010

Untuk Short Cut Padang-Solok tahapan yang telah dilaksanakan adalah Pra Study tahun 2008, Study Kelayakan dan Penentuan Trase tahun 2009 dan Penyusunan DED pada tahun 2010, yang seluruhnya dengan dana APBN, untuk Fisik diusulkan melalui dana APBN Kementerian Perhubungan untuk tahun 2015.

4. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan

Untuk kelancaran angkutan penyeberangan, telah dibangun pelabuhan penyeberangan permanen pada 3 (tiga) lokasi yaitu Siberut, Tua Pejat dan Sikakap. Pelabuhan Penyeberangan Siberut dan Tua Telah mulai dioperasikan sejak awal 2010.

Sedangkan pada tahun 2015 melalui APBN dilakukan pembangunan tahap II dermaga Ombilin, Danau Singkarak dan pembangunan dermaga di Tanjung Sani, danau Maninjau.

Untuk Kapal penyeberangan sampai dengan tahun 2015 telah beroperasi 2 unit kapal di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 2.12 Kapal dan Lintasan Penyeberangan

No.	NAMA KAPAL	LINTASAN PENYEBERANGAN	FUNGSI
1	KMP AMBU-AMBU	Padang - Sikakap Padang - Tua Pejat	Angkutan Penumpang & Kendaraan
2	KMP GAMBOLO	Padang – Siberut – Sikabaluan Padang – Tua Pejat	Angkutan Penumpang & Kendaraan

B. Pelayanan Sub Sektor Laut.

Sektor laut saat ini menjadi prioritas bagi pemerintah pusat dalam hal peningkatan infrastruktur serta sarana dan prasarananya untuk mewujudkan negara Bahari yang kuat.

Pelabuhan Teluk Bayur sebagai pelabuhan Utama yang merupakan satu – satunya pelabuhan laut teramai dan terbesar di pantai barat pulau Sumatera didirikan pada tahun 1893 dengan nama " EMMA HAVEN ". Oleh sebab itu Pelabuhan Teluk Bayur mempunyai peranan yang sangat strategis tidak saja merupakan pintu gerbang angkutan laut bagi orang, barang dan jasa bagi daerah Sumatera Barat tetapi juga daerah – daerah di sekitarnya seperti Sumatera Utara bagian selatan, Aceh, Riau, Jambi dan Bengkulu. Disamping itu

juga berorientasi kepada negara – negara di kawasan Timur Indonesia seperti (Asia Selatan, Asia Barat, Afrika dan Saudi Arabia).

Untuk memenuhi tuntutan dari perkembangan Pelabuhan Teluk Bayur yang terus berkembang maka diadakan upaya – upaya untuk mengoptimalisasikan pelayanan terutama peningkatan fasilitas (sarana dan prasarana) pelabuhan yang ada. Upaya tersebut telah dilakukan melalui Study Rencana Induk / Master Plan Pelabuhan Teluk Bayur yang dibuat pada tahun 1983 dan dikaji ulang pada tahun 1996, tahun 2004 serta terakhir pada tahun 2015. Proyeksi pengembangan pelabuhan dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2030 yaitu Jangka Pendek (s/d tahun 2010), Jangka Menengah (s/d Tahun 2020) dan Jangka Panjang (s/d tahun 2030). Study ini bertujuan untuk mendapat kerangka acuan dasar di dalam rencana pengembangan dan pembangunan pelabuhan Teluk Bayur sehingga dapat diwujudkan pemanfaatan areal pelabuhan yang berkualitas, serasi dan optimal dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta kemampuan daya dukung lingkungan .

Pelabuhan Teluk Bayur berjarak \pm 7 km dari pusat Kota Padang mempunyai areal pelabuhan seluas 434,47 Ha terdiri dari luas daratan 428 Ha dan luas lautan 6,47 Ha, jika dilihat dari sudut pengapalan barang export seperti semen, batu bara dan CPO pengapalan melalui pelabuhan Teluk Bayur setiap tahun terlihat peningkatan, maka pelabuhan tersebut telah wajib untuk dikembangkan.

Kepulauan Mentawai yang saat ini terus berbenah juga membutuhkan beberapa pembangunan fisik dermaga guna menunjang transportasi didaerah tersebut, dimana saat ini dokumen perencanaan telah disediakan baik itu dari APBD Provinsi di Sumatera Barat, APBD Kab. Kepulauan Mentawai maupun dari dana APBN Kementerian Perhubungan, dan diperlukan sarana transportasi yang cukup karena masih banyaknya terdapat daerah terosir dan terpencil di Kab. Kepulauan Mentawai.

Untuk menunjang transportasi laut di beberapa daerah, telah dibangun beberapa pelabuhan yang umumnya ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan data sebagai berikut :

Tabel 2.13 Pelabuhan yang sudah Ada Dermaga di Provinsi Sumatera Barat

No.	NAMA PELABUHAN	LUAS DERMAGA	LOKASI
1	Pelabuhan Teluk Bayur	30.460 m ²	Kota Padang
2	Pelabuhan Muara Padang	1.096 m ²	Kota Padang
3	Pelabuhan Sikakap	1.024 m ²	Kab. Kep. Mentawai
4	Pelabuhan Siuban	560 m ²	Kab. Kep. Mentawai
5	Pelabuhan Tua Pejat	548 m ²	Kab. Kep. Mentawai
6	Pelabuhan Muara Siberut	416 m ²	Kab. Kep. Mentawai
7	Pelabuhan Pokai	816 m ²	Kab. Kep. Mentawai
8	Pelabuhan Pasapuat	560 m ²	Kab. Kep. Mentawai
9	Pelabuhan Carocok Painan	816 m ²	Kab. Pesisir Selatan
10	Pelabuhan Teluk Tapang	1.440 m ²	Kab. Pasaman Barat
11	Pelabuhan Air Bangis	330 m ²	Kab. Pasaman Barat

Sedangkan untuk perencanaan pembangunan pelabuhan juga telah disiapkan dokumen perencanaan diantaranya :

1. Dokumen Perencanaan Pelabuhan Labuhan Bajau Kab. Kepulauan Mentawai

Tabel 2.14 Tahapan Perencanaan Pelabuhan Labuhan Bajau

NO	KEGIATAN	TAHUN	DANA
1	Pra Studi Kelayakan	2010	APBD Sumbar
2	Studi Kelayakan	2011	APBD Sumbar
3	Rencana Induk Pelabuhan	2012	APBD Sumbar
4	Detail Engineering Design	2013	APBD Sumbar
5	DLKr & DLKp Pelabuhan	2013	APBD Sumbar
6	Dok. Lingkungan UKL-UPL	2015	APBD Sumbar

2. Dokumen Perencanaan Pelabuhan Subelen Kab. Kepulauan Mentawai

Tabel 2.15 Tahapan Perencanaan Pelabuhan Subelen

NO	KEGIATAN	TAHUN	DANA
1	Studi Kelayakan	2008	APBD Sumbar
2	Rencana Induk Pelabuhan	2009	APBD Sumbar
3	Detail Engineering Design	2012	APBD Sumbar
4	DLKr & DLKp Pelabuhan	2013	APBD Sumbar

Guna pengembangan pelabuhan yang sudah ada telah disiapkan dokumen pendukung yaitu Dokumen Perencanaan Pengembangan Pembangunan Pelabuhan Siberut/Simailepet Kab. Kepulauan Mentawai

Tabel 2.16 Tahapan Perencanaan Pelabuhan Siberut/Simalepet

NO	KEGIATAN	TAHUN	DANA
1	Dokumen Lingkungan DPLH	2015	APBD Sumbar
2	DED Perpanjangan Dermaga	2015	APBD Sumbar
3	DLKr & DLKp Pelabuhan	2015	APBN
4	Dokumen Lingkungan UKL-UPL	2016	APBD Sumbar
5	Rencana Induk Pelabuhan	2016	ABPN

Dan untuk kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Bidang Perhubungan Laut selama kurun waktu 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.17 Kegiatan Perhubungan Laut 2010 - 2015

NO	TAHUN	KEGIATAN
1	2010	Pengawasan Pelayanan Angkutan Laut Perintis
2	2011	Pengawasan Pelayanan Angkutan Laut Perintis
3	2012	Pengawasan Pelayanan Angkutan Laut Perintis Penyuluhan Pengukuran Kapal
4	2013	Pengawasan Pelayanan Angkutan Laut Perintis Sosialisasi PP 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
5	2014	Pengawasan Pelayanan Angkutan Laut Perintis Pembinaan tentang keselamatan pelayaran dan Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan Kab/Kota Di Sumbar
6	2015	Pengawasan Pelayanan Angkutan Laut Perintis Pembinaan terhadap perusahaan penunjang angkutan laut sesuai PP no. 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan

Kegiatan pengawasan dan monitoring rutin dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan pelayanan transportasi, serta sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan pada tahun-tahun berikutnya.

C. Pelayanan Sub Sektor Udara.

Di Sumatera Barat saat ini terdapat 6 buah bandara :

1. Bandara Internasional Minangkabau (BIM) di Padang
2. Bandara Tabing di Padang
3. Bandara Rokot di Sipora kab. Kep. Mentawai
4. Bandara Pusako Anak Nagari di Pasaman Barat
5. Bandara Khusus Tidar Kerinci Agung (TKA) di Kab. Solok Selatan
6. Bandara Piobang di Kab. 50 Kota

Tetapi yang menjadi bagian dari pelayanan Dinas Perhubungan Prov. Sumatera Barat hanya 4 bandara, sementara Bandara Piobang tidak lagi beroperasi dan Bandara TKA digunakan untuk kepentingan perusahaan TKA.

Perkembangan jumlah pesawat terbang yang melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM) meningkat setiap tahunnya, oleh karena itu panjang landasan (Runway) telah diperpanjang dari 2.750 x 45 m menjadi 3.000 x 45 m.

Tabel 2.18 Jumlah Pesawat Terbang yang melalui BIM

No.	TAHUN	DALAM NEGERI	LUAR NEGERI	JUMLAH
1	2011	13.531	1.120	14.651
2	2012	15.125	1.661	16.786
3	2013	17.264	1.746	19.010
4	2014	17.300	1.534	18.834
5	2015	19.402	1.511	20.913
JUMLAH		82.622	7.572	90.194

Meningkatnya perkembangan pariwisata di Sumatera Barat berdampak dengan meningkatnya jumlah penumpang pesawat terbang dari tahun ke tahun.

Tabel 2.19 Jumlah Penumpang Pesawat Terbang yang melalui BIM

No.	TAHUN	DALAM NEGERI	LUAR NEGERI	JUMLAH
1	2011	2.066.636	147.217	2.213.853
2	2012	2.334.596	251.675	2.586.271
3	2013	2.485.420	206.840	2.692.260
4	2014	2.481.573	192.627	2.674.200
5	2015	2.841.498	191.818	3.033.310
JUMLAH		12.209.723	990.177	13.199.894

Untuk melihat sejauhmana kinerja Dinas Perhubungan, maka dilakukan pengukuran kinerja dengan memakai indikator dari Perjanjian Kinerja antara Dinas Perhubungan dengan Kepala Daerah (dapat dilihat pada tabel T.IV.C.2). Dari tabel ini dapat memperlihatkan kinerja SKPD selama jangka waktu pelaksanaan Renstra sebelumnya, yaitu Renstra tahun 2011-2015.

Anggaran Belanja pada Dinas Perhubungan pada program kerja yang berkaitan dengan tugas di bidang perhubungan untuk Tahun 2010 - 2015 cukup berfluktuasi. Pada program Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ pada tahun 2011 terjadi penurunan anggaran, kemudian baru meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pada program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas dari tahun 2010 – 2013 peningkatan anggaran cukup signifikan, tetapi menurun pada tahun 2014, kemudian meningkat kembali pada tahun 2015. Begitu juga untuk program Pengembangan Angkutan Kereta Api dan Pemeliharaan Rehabilitasi dan Peningkatan Transportasi Laut anggarannya cukup berfluktuasi. Program yang penganggarannya naik secara signifikan adalah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Transportasi Udara dan Pengembangan. Untuk lebih jelasnya Anggaran dan realisasi program dapat dilihat pada tabel T.IV.C.3 dibawah ini.

Tabel T.IV.C.2 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Perjanjian Kinerja	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun (%)					Rasio Capaian (%)				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Porsentase Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan Kominfo	-	-	100 %	84,56%	65,58%	38,47%	34,07%	31,17%	84,56%	102,26	85,84%	116,95 %	141,11 %	100%	84,56%	102,26	85,84%	116,95 %
2	Porsentase Jumlah Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum dan Jumlah Angkutan Barang yang laik Jalan	-	-	100 %	16 Keg	3 paket	18 Keg	18 Keg	100%	82,34%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah Peningkatan MRL pada perlintasan sebidang jalur Kereta Api dengan Jalan	-	-	100 %	1 pkt	1,55 pkt	3 Pkt	3 Pkt	3 Pkt	50%	77,50%	75%	75%	100%	50%	77,50%	75%	75%	100%
4	Porsentase Keterbukaan Wilayah Terpencil	-	-	100 %	2 trayek/4 prov	2 trayek/4 prov	2 trayek/4 prov	2 trayek/4 prov	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Jumlah Pelayanan Angkutan Udara Untuk Keselamatan Penerbangan CJH	-	-	100 %	7000 org	7500 org	7500 Org	7000 org	7000 org	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Jumlah Informasi yang dipublikasikan melalui :	-	-	100 %	30 berita	35 berita	40 berita	45 berita	48 berita	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Media Massa	-	-	100 %	4 tv	4 tv	4 tv	4 tv	4 tv	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Elektronik	-	-	100 %	4 tv	4 tv	4 tv	4 tv	4 tv	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Badan politik dan tatap muka	-	-	100 %	300 org	400 org	500 org	700 org	900 org	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel T.IV.C.3 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

URAIAN PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE - (%)						RATA-RATA PERTUMBUHAN (Rp)	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	1	2	3	4	5	6	ANGGAR AN	REALISAS I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	2.735.000.000	1.465.600.000	2.865.057.112	4.375.670.000	4.175.000.000	5.158.363.710	2.561.966.900	1.350.346.125	2.738.231.100	4.131.361.100	4.079.314.511	5.000.332.218	93,6	92,1	95,5	94,4	97,7	96,9	3.594.727.285	3.395.355.603
Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	195.200.000	1.581.000.000	1.516.000.000	2.483.523.500	1.765.000.000	2.611.286.750	182.417.300	1.337.184.450	1.332.821.113	1.841.052.325	1.421.600.550	2.110.739.625	93,4	84,5	87,9	74,1	80,5	80,8	630.414.458	534.207.238
Pengembangan Angkutan Kereta Api	210.000.000	8.876.210.000	9.829.000.000	16.759.879.099	2.900.000.000	9.118.056.570	190.690.450	8.645.578.100	9.050.896.000	10.149.651.000	1.920.575.729	8.495.848.478	90,8	97,4	92,0	60,5	66,2	93,1	1.729.676.095	1.606.665.196
Pemeliharaan Rehabilitasi dan Peningkatan Transportasi Laut	278.300.000	649.500.000	959.901.000	1.299.981.400	715.000.000	2.272.747.200	183.295.100	543.292.750	931.703.800	1.286.065.700	677.718.150	2.226.846.750	65,8	83,6	97,0	98,9	94,7	97,9	657.091.200	554.436.225
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Transportasi Udara	140.000.000	306.000.000	350.000.000	479.375.000	564.000.000	453.801.925	121.638.950	236.781.900	230.657.525	323.711.975	415.029.175	334.828.570	86,8	77,3	65,9	67,5	73,5	73,7	215.633.654	177.443.712
Pengembangan Komunikasi Dan Informatika	140.000.000	130.000.000	410.000.000	792.938.500	1.955.000.000	2.875.658.700	121.638.950	124.114.250	249.045.400	715.838.125	1.855.500.000	2.584.900.972	86,8	95,4	60,7	90,2	94,9	89,8	619.276.450	552.455.779

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan OPD

Tantangan dalam program reformasi di bidang transportasi, terutama dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan reposisi kelembagaan pemerintah di bidang transportasi untuk lebih memperjelas peran dan fungsi pemerintah, perlu lebih ditekankan pada peran regulator, serta penciptaan iklim yang kondusif bagi peranserta swasta dan pemerintah baik itu Pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan jasa transportasi yang efisien, akuntabel, kompetitif dan profesional.

Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan kedepan antara lain :

1. Peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum
2. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan
3. Pengembangan dan reaktivasi jalur kereta api
4. Pengawasan penyelenggaraan transportasi untuk peningkatan
5. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas
6. Membuka akses transportasi di daerah terpencil untuk membantu peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dari tantangan yang ada muncul peluang dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi di bidang Perhubungan, diantaranya :

1. Kebijakan pemerintah pusat yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatnya upaya Pemda dalam menggali potensi daerah yang mendorong peningkatan mobilitas.
3. Adanya hubungan dan kerjasama yang baik dengan stakeholders dan instansi teknis terkait lainnya.
4. Adanya minat swasta untuk berinvestasi di bidang transportasi

Bab III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI



3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan, tentunya menghadapi berbagai permasalahan dan kendala

Hal ini tentunya berpengaruh kepada sasaran atau target yang ingin dicapai sehingga tidak bisa maksimal, sehingga permasalahan-permasalahan ini perlu ditangani secara serius. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir yang selanjutnya menjadi isu strategis bagi Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya, antara lain sebagai berikut :

1. Sekretariat
 - a. Rendahnya tingkat disiplin pegawai
 - b. Masih lemahnya pengawasan dan evaluasi untuk kinerja pegawai
 - c. Kurangnya pegawai yang memiliki kompetensi teknis di bidang Perhubungan
2. Bidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian Dan Pengembangan

- a. Angkutan Jalan

Angkutan jalan mempunyai peranan besar untuk angkutan dalam Provinsi dan dalam kota, baik dengan moda kendaraan angkutan umum maupun moda angkutan kendaraan pribadi. Kondisi jalan di Sumatera Barat pada umumnya cukup baik. Panjang jalan yang ada di Sumatera Barat terbagi atas jalan nasional 1.448,81 KM dan jalan provinsi 1.525,20 KM Sebagian besar kondisi jalan nasional maupun jalan provinsi di Sumatera Barat dalam keadaan baik.

Pertumbuhan jumlah kendaraan yang semakin tinggi menghasilkan beberapa dampak atau permasalahan transportasi dan masalah keselamatan lalu lintas dan

angkutan jalan. Hal ini disadari karena pertumbuhan kendaraan bermotor yang secara otomatis bertambahnya jumlah pengguna kendaraan bermotor di jalan sehingga juga harus di ikuti dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap tata cara berkendara yang baik, pemahaman terhadap peraturan lalu lintas lainnya serta penyediaan fasilitas lalu lintas sebagai pedoman, penuntun dan petunjuk bagi pemakai jalan.

Untuk itu, kondisi infrastruktur jalan yang baik tersebut perlu didukung dengan kelengkapan fasilitas /prasarana keselamatan lalu lintas seperti rambu, marka, delineator, guardrail, traffic light, cermin tikungan serta fasilitas lalu lintas lainnya sebagai pedoman, penuntun dan petunjuk bagi pemakai jalan.

Simpul transportasi angkutan jalan berupa terminal type A dan Type B di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 9 terminal, namun untuk kewenangan pemerintah provinsi hanya berada di terminal type B saja. Sedangkan jumlah mobil bis yang melayani Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) adalah 1.578 unit yang melayani 181 trayek, untuk AJDP terdapat 82 unit, sedangkan yang melayani Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) adalah 535 unit.

Pemasalahan lalu lintas angkutan jalan antara lain :

- 1) Tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi mengakibatkan penggunaan ruang jalan tidak efektif dan efisien sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas.
- 2) Peningkatan pencemaran udara sebagai akibat meluasnya kemacetan lalu lintas
- 3) Belum memadainya ketersediaan fasilitas penunjang dalam optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi
- 4) Dalam aspek pelayanan angkutan antara lain belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi serta belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan angkutan keperintisan.
- 5) Rendahnya disiplin berlalu lintas.
- 6) Belum optimalnya fungsi kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi secara terintegrasi
- 7) Minimnya kesadaran dan peran serta masyarakat akan keselamatan dan keamanan transportasi;
- 8) Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi

- 9) Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi meliputi kecukupan dan kehandalan sarana prasarana /fasilitas lalu lintas untuk keselamatan dan keamanan transportasi.
- 10) Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Transportasi sesuai kompetensi standar keselamatan dan keamanan transportasi.
- 11) Tingginya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan
- 12) Belum terintegrasinya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk peningkatan keselamatan jalan
- 13) Belum optimalnya penanganan perlintasan sebidang jalur KA dengan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. Perkeretaapian

Keberadaan jaringan KA di Sumatera Barat merupakan modal utama yang sangat berharga untuk menjadi dasar pengembangan KA sebagai bagian dari sistem transportasi wilayah. Keberadaan aset jalan KA sepanjang 278,461 km, dimana 197,936 km merupakan lintas operasi sedangkan sisanya sepanjang 80,525 km merupakan lintas non operasi mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai tulang punggung angkutan khususnya angkutan barang sebagaimana telah terjadi pada jaman Belanda sampai beberapa dekade yang lalu. Angkutan hasil alam, khususnya pertambangan batubara telah menjadi salah satu aktifitas perdagangan yang juga ditopang oleh keberadaan Pelabuhan Teluk Bayur sebagai Pelabuhan Utama Internasional di pantai barat Sumatera.

Guna meningkatkan peran kereta api dalam konstelasi sistem transportasi Sumatera Barat (dan juga Pulau Sumatera), dibutuhkan rencana pengembangan yang terencana dan komprehensif untuk mengoptimalkan keberadaan jaringan kereta api yang ada dan pembangunan jalur kereta api baru sehingga diharapkan memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat serta memperkuat posisi Sumatera Barat dalam jaringan Kereta Api Trans Sumatera.

Permasalahan angkutan Kereta Api antara lain :

- 1) Masih rendahnya peranan KA dalam pelayanan angkutan umum baik orang maupun barang.
- 2) Banyaknya rel mati atau tidak berfungsi, dan bahkan pada sebagian ruas telah digunakan oleh masyarakat untuk permukiman dan lain sebagainya, sehingga untuk mengembalikan kepada kondisi dan fungsi semula akan membutuhkan proses yang sulit dan cukup panjang.
- 3) Banyaknya perlintasan sebidang yang tidak resmi yang memiliki dampak resiko kecelakaan yang tinggi baik terhadap pemakai jalan raya diperlintasan sebidang maupun keselamatan dan keamanan kereta api serta juga berpengaruh terhadap kecepatan perjalanan kereta api.
- 4) Belum terintegrasinya dengan moda angkutan yang lain.

c. Pengembangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis serta pelaksanaan kegiatan sesuai urusan dan ruang lingkup lalu lintas angkutan darat. Pemahaman terhadap peraturan lalu lintas lainnya serta penyediaan fasilitas lalu lintas sebagai pedoman, penuntun dan petunjuk bagi pemakai jalan. Untuk itu, kondisi infrastruktur jalan yang baik tersebut perlu didukung dengan kelengkapan fasilitas /prasarana keselamatan lalu lintas seperti rambu, marka, delineator, guardrail, traffic light, cermin tikungan serta fasilitas lalu lintas lainnya sebagai pedoman, penuntun dan petunjuk bagi pemakai jalan.

3. Bidang Pelayaran

a. Seksi Kepelabuhan

Pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang Perhubungan Laut memiliki beberapa hambatan diantaranya :

1. Belum optimalnya pelayanan transportasi laut terhadap masyarakat didaerah terpencil dan terisolir terutama dibagian Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Belum lengkapnya dokumen perencanaan (tukar menukar kawasan hutan lindung pelabuhan Subelen di Kabupaten Kepulauan Mentawai)
3. Belum terlaksananya pembangunan fisik pelabuhan atau dermaga yang telah dilengkapi dengan dokumen perencanaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai
4. Belum terlaksananya subsidi untuk kapal MV. Mentawai Fast 2 yang melayari rute Padang – Mentawai

Secara garis besar kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Dinas Perhubungan dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi mengakibatkan penggunaan ruang jalan tidak efektif dan efisien sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas
 2. Belum memadainya kualitas pelayanan angkutan umum
 3. Peningkatan pencemaran udara sebagai akibat meluasnya kemacetan lalu lintas
 4. Rendahnya disiplin berlalu lintas.
 5. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi secara terintegrasi
 6. Minimnya kesadaran dan peran serta masyarakat akan keselamatan dan keamanan transportasi;
 7. Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi
 8. Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi meliputi kecukupan dan kehandalan sarana prasarana keselamatan dan keamanan transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi.
 9. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Transportasi sesuai kompetensi standar keselamatan dan keamanan transportasi.
 10. Tingginya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan
 11. Belum terintegrasinya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk peningkatan keselamatan jalan
 12. Belum optimalnya penanganan perlintasan sebidang jalur KA dengan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- b. Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) di Sumatera Barat khususnya Angkutan Penyeberangan juga mempunyai peranan yang cukup penting. Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai daerah kepulauan dengan pintu gerbang melalui pelabuhan penyeberangan di Bungus Teluk Kabung Padang, sangat mengandalkan angkutan penyeberangan dalam pengangkutan bahan pokok dan bahan material pembangunan. Saat ini ada 4 (empat) lintasan angkutan penyeberangan kedaerah ini yaitu Padang - Sikakap, jarak 104 mil; Padang – Tua Pejat, jarak 90 mil; Padang-Muara Siberut, jarak 82 mil dan Muara Siberut – Sikabalu, jarak 60 mil; dengan 4 (empat) pelabuhan penyeberangan di Bungus Padang, Sikakap dan Tua Pejat serta Muara Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kapal penyeberangan yang melayani lintasan tersebut sebanyak 2 (dua) unit kapal jenis Ro-ro yaitu KMP. Ambu-Ambu 571 GT dan KMP. Gambolo 560 GT.

Pemmasalahan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP)

- 1) Masih terbatasnya pelayanan kapal penyeberangan yang melayani antar pulau di kepulauan Mentawai.
- 2) Pelayanan kapal di Sikabalu masih menggunakan dermaga pelabuhan laut, sehingga tidak sesuai dengan peruntukan kapal penyeberangan jenis Ro-ro yang sangat rawan terjadi kecelakaan baik bagi penumpang maupun keamanan kapal.
- 3) Masih perlunya peningkatan fasilitas keamanan dan standar keelamatan di pelabuhan.
- 4) Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan
- 5) Masih rendahnya penggunaan kapasitas kapal sehingga masih perlunya subsidi untuk memberikan pelayanan kepada wilayah kepulauan dalam pelayanan angkutan penyeberangan sehingga terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat

Dari permasalahan yang ada tentunya tugas Dinas Perhubungan ke depan semakin berat. Oleh karena itu penguatan lembaga, peningkatan kapasitas SDM dan koordinasi dengan instansi terkait perlu ditingkatkan untuk bisa mengurangi permasalahan dan meningkatkan pelayanan transportasi.

c. Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran

Seksi Angkutan Pelayaran merupakan Satuan Kerja Bidang Pelayaran yang memiliki tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dalam perencanaan dan pengembangan terkait angkutan pelayaran. Seksi Angkutan Pelayaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayaran.

Seksi Angkutan Pelayaran mempunyai tugas:

- menyusun rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pelayaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pelayaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- menyusun bahan perumusan regulasi perizinan usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten / kota dalam wilayah daerah provinsi;
- menyusun bahan perumusan regulasi perizinan usaha angkutan laut pelayaran rakyat yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah

kabupaten / kota dalam wilayah daerah provinsi, pelabuhan antar provinsi, dan pelabuhan internasional;

- menyusun bahan perumusan regulasi perizinan jasa terkait bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan kepelabuhanan, penyewaan peralatan angkutan laut / jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan depo peti kemas pelabuhan antar daerah kabupaten / kota dalam wilayah daerah provinsi;
- menyusun bahan perumusan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar daerah kabupaten / kota dalam daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan / atau jaringan jalur penyeberangan provinsi;
- melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Angkutan Pelayaran;

Tabel T.IV.C.9 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
Gambaran pelayanan SKPD	Belum optimal	Persentase Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi.	Keterbatasan anggaran	Regulasi dan proses pengadaan barang jasa	Kebutuhan daerah akan sarana prasarana transportasi tidak seimbang dengan kemampuan pendanaan.
Kajian terhadap Renstra Kabupaten/Kota	Sudah selaras	Hasil Musrenbangprov.	Prioritas dalam pembangunan sarana dan prasarana transportasi di daerah	Tahapan perencanaan di kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota seringkali tidak melengkapi usulan pembangunan sarana prasarana transportasi dengan dokumen pembebasan lahan, DED dan masterplan.
Kajian terhadap Renstra K/L	Sudah selaras	Hasil Musrenbangnas	Koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait arah pembangunan infrastruktur di pusat.	Prioritas infrastruktur dari K/L	Pembebasan lahan untuk pengembangan sarana prasarana transportasi Kepadatan lalu lintas yang berisiko menyebabkan

					kecelakaan lalu lintas
					Masih rendahnya SDM yang paham aplikasi teknologi informasi dan sistem manajemen perkotaan
Kajian terhadap RTRW dan KLHS	Sudah merujuk kepada RTRW dan KLHS	Dokumen Amdal	Rencana pembangunan pelabuhan, dan pengembangan jalur kereta api (short cut) Padang - Solok	Kebutuhan RTH dalam rencana pembangunan dermaga	Perubahan lingkungan terkait rencana pembangunan pelabuhan dan pengembangan jalur kereta api (short cut) Padang - Solok

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Dengan terpilihnya Kepala Daerah yang baru, maka ditetapkanlah Visi, Misi dan Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2016 - 2021, yaitu :



"Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera"

Dalam upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 5 Misi Pembangunan, yaitu :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradab, dan berbudaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi.
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan daerah

5. Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Untuk Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat.
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan.
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan.
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
5. Kedaulatan pangan dan pengembangan agribisnis.
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi dan investasi.
7. Pengembangan kemaritiman dan kelautan.
8. Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan daerah tertinggal.
9. Pengembangan energi dan pembangunan infrastruktur.
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam.

Dari misi gubernur yang ditetapkan, untuk tupoksi Perhubungan mendukung kepada Misi yang ke-5, yaitu **Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan**. Dan untuk Prioritas Pembangunan Daerah, tupoksi bidang Perhubungan mendukung kepada program ke-9 yaitu **Pengembangan Energi dan Pembangunan Infrastruktur**. Untuk mendukung misi dan program yang telah ditetapkan maka perencanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2021 akan difokuskan kepada target capaian dari misi dan prioritas pembangunan daerah tersebut.

Dalam penyusunan RPJMD, untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang menjadi prioritas daerah dilakukan dengan strategi :

1. Mendayagunakan nilai-nilai gotong royong dan kerjasama yang ada di masyarakat dengan pendekatan pembangunan terpadu yang bersifat holistik dan integratif.
2. Meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia dan pemberdayaan perempuan untuk mendukung pembangunan pada semua aspek kehidupan masyarakat
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk pembangunan ekonomi yang semakin terbuka dibidang pertanian, pariwisata, industri, kelautan dan kemaritiman, serta energi.
4. Menekan kesenjangan pembangunan antar wilayah untuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

5. Melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Pelaksanaan dan strategi tersebut diwujudkan dalam bentuk 9 gerakan pembangunan terpadu yaitu :

1. Gerakan Terpadu Pengamalan Nilai-nilai Agama Dan Pelestarian Serta Aplikasi ABS-SBK
2. Gerakan Terpadu Reformasi Birokrasi Pemerintahan
3. Gerakan Terpadu Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani (GPP)
5. Gerakan Terpadu Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GPEMP)
6. Gerakan Terpadu Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Dan Kecil
7. Gerakan Terpadu Pengembangan Kepariwisata
8. Gerakan Terpadu Pemberdayaan Fakir Miskin
9. Gerakan Terpadu Sumbar Bersih dan Pembangunan Berkelanjutan

Maka untuk gerakan terpadu, Dinas Perhubungan mendukung kepada poin 2 yaitu Gerakan Terpadu Reformasi Birokrasi Pemerintahan. Poin 5 yaitu Gerakan Terpadu Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GPEMP) dan poin 9 yaitu Gerakan Terpadu Sumbar Bersih dan Pembangunan Berkelanjutan.

Sehingga terlihat bahwa Dinas Perhubungan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih dan tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perhubungan yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Tertuang dalam RPJMD

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani dan Sejahtera				
Misi 5 : Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	1. Meningkatnya pelayanan perhubungan/transportasi	1. Mempercepat pengoperasionalan transportasi massal dalam rangka meningkatkan pelayanan publik	1. Pengembangan aksesibilitas pelayanan angkutan umum antar kota dalam propinsi, kawasan aglomerasi perkotaan dan pelayanan angkutan perintis pada daerah-daerah terpencil	
			2. Pengembangan jaringan dan prasarana pelayanan angkutan SDP	
		2. Membangun konektivitas wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, objek wisata dan simpul transportasi	1. Pengembangan aksesibilitas layanan transportasi dalam mendukung pariwisata Sumbar	
			2. Pembangunan infrastruktur simpul/sistem jaringan transportasi antar dan intermoda	
			3. Pembangunan fasilitas keselamatan kereta api	
		3. Menciptakan integrasi antar dan intermoda	1. Perbaikan kelembagaan dan standar pelayanan angkutan umum	
		4. Penguatan peran pemerintah dalam penyelenggaraan transportasi publik	1. Meningkatkan kompetensi SDM melalui diklat-diklat teknis	
			2. Peningkatan/pengembangan sistem perijinan	
		2. Meningkatnya keselamatan lalu lintas	1. Menciptakan transportasi yang berkeselamatan dalam menyukseskan program pemerintah menuju <i>Zero Accident</i>	1. Peningkatan dan pengembangan fasilitas keselamatan LLAJ
				2. Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada daerah <i>Black Area</i> dan <i>Black Spot</i>
3. Pemaduserasian program peningkatan keselamatan jalan dengan instansi terkait				
4. Sosialisasi/advokasi keselamatan jalan				
5. Pengawasan terhadap pelanggaran perizinan dan standar pelayanan				

Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD

Tabel.T.IV.C.11 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera				
No.	Misi dan Program KDH	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Kebutuhan daerah akan sarana prasarana transportasi tidak seimbang dengan kemampuan pendanaan.	Keterbatasan anggaran APBD Provinsi	Adanya dana DAK dan APBN
		Kabupaten/Kota seringkali tidak melengkapi usulan pembangunan sarana prasarana transportasi dengan dokumen pembebasan lahan, DED dan masterplan.	Kurangnya perencanaan dalam mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi	Adanya keinginan yang kuat dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan sarana dan prasarana transportasi di daerah.
		Pembebasan lahan untuk pengembangan sarana prasarana transportasi	Penyelesaian tanah ulayat yang sulit, karena menyangkut banyak pihak	Kebutuhan masyarakat untuk pelayanan jasa transportasi yang optimal
		Kepadatan lalu lintas yang berisiko menyebabkan kecelakaan lalu lintas	Tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi	Keinginan masyarakat akan pelayanan transportasi umum yang nyaman
		Perubahan lingkungan terkait rencana pembangunan pelabuhan dan pengembangan jalur kereta api (short cut) Padang - Solok	Dampak negatif akan rusaknya mangrove dan terumbu karang, dan rusaknya utan lindung	Kebutuhan daerah untuk pembangunan sarana prasarana transportasi untuk meningkatkan daya saing daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L.

Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2010-2014, maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dijabarkan dalam 3 aspek yaitu (i) keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan transportasi, dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

- **Handal** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air;
- **Berdaya Saing** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;
- **Nilai tambah** diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (*national security dan sovereignty*) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (*sustainable development*)

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Tahun 2015-2019, dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Keselamatan dan Keamanan Transportasi, meliputi :

1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi.
2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.

B. Pelayanan Transportasi, meliputi :

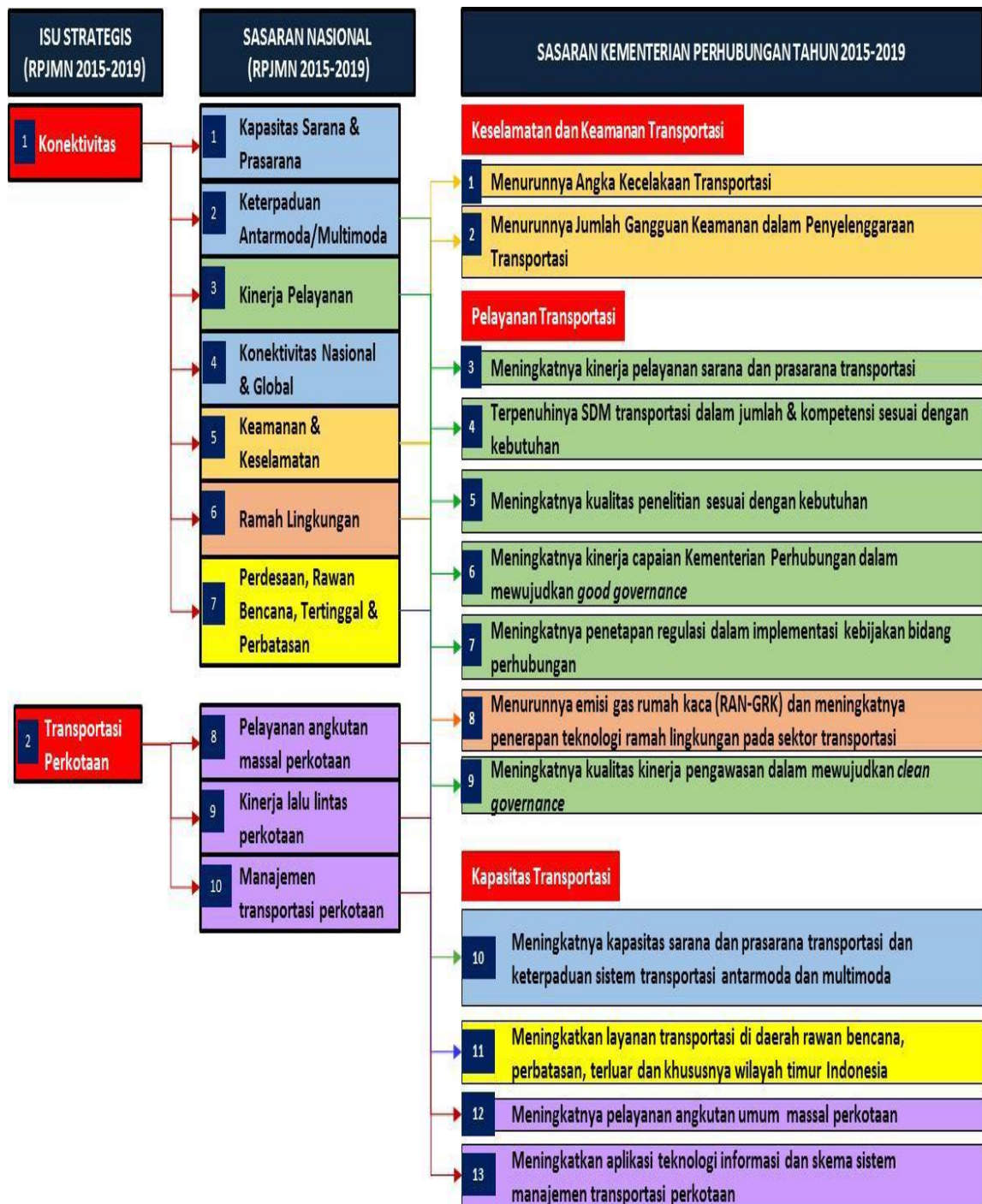
1. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi.
2. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan.
3. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan.
4. Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance*.
5. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan.

6. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi.
7. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan *clean governance*;

C. Kapasitas Transportasi, meliputi :

1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda.
2. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang.
3. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia.
4. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan.
5. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

Sasaran pembangunan transportasi Kementerian Perhubungan pada prinsipnya sejalan dengan Sasaran Pembangunan Nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.



Interkoneksi antara isu strategis dan sasaran Kementerian Perhubungan diperlukan sebagai dasar dalam mengidentifikasi alur pikir perencanaan pembangunan transportasi tahun 2015-2019, sehingga hubungan linearitas antara isu strategis dan sasaran pembangunan transportasi ke depan dapat terarah dan sejalan dengan agenda prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, sehingga sasaran Kementerian Perhubungan memiliki interkoneksi secara langsung dengan 9 agenda prioritas nasional (Nawa Cita). Hal ini memberikan konsekuensi logis dalam bidang transportasi bahwa konsep perencanaan dan pendekatan pembangunan bidang transportasi akan mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas nasional selama 5 (lima) tahun ke depan. Pendekatan isu strategis transportasi dalam perumusan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 menjadi penting untuk lebih menata dan mengelola transportasi dengan baik, serta berbasis pendekatan multidimensi/multisektor termasuk dalam hal ini kaitannya dengan aspek tata ruang, gender, sosial, lingkungan, dan budaya. Pendekatan tersebut akan membawa sinergitas pembangunan transportasi secara lebih terpadu, mewujudkan pembangunan dan penanganan permasalahan transportasi secara lebih komprehensif dan membawa perubahan pada karakteristik masyarakat, maupun perilaku masyarakat dalam menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana transportasi secara lebih baik dan bijaksana. Demikian juga Pemerintah menjadi bagian penting sebagai pihak yang akan selalu hadir dalam mengupayakan pembangunan dan pengembangan transportasi.

Terkait sasaran pembangunan infrastruktur transportasi jangka menengah Renstra K/L, ada beberapa hambatan yang mempengaruhi pelayanan SKPD, diantaranya :

1. Permasalahan pembebasan lahan untuk pengembangan sarana prasarana transportasi, seperti pembebasan lahan untuk terminal, dermaga dan untuk pengembangan jalur kereta api.
2. Kepadatan lalu lintas yang meningkat sehingga berpotensi menyebabkan kemacetan dan perilaku masyarakat pengguna jalan yang berisiko menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
3. Masih rendahnya jumlah SDM yang paham aplikasi teknologi informasi dan sistem manajemen transportasi perkotaan.

Hal-hal diatas memberi pengaruh pengaruh kepada pelayanan SKPD kepada masyarakat luas.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Keterkaitan antara Renstra dengan RTRW Provinsi Sumatera Barat dapat dianalisis dari Misi RPJMD dengan tujuan dari Penataan ruang. Untuk Dinas Perhubungan berkaitan dengan RPJMD pada Misi ke 5 yaitu Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan isu rumusan kebijakan penataan ruang provinsi Sumatera Barat yang terkait dengan Dinas Perhubungan adalah pendorongan terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah

Dari Misi RPJMD Misi yang parallel dengan tujuan penataan ruang dapat dilihat pada pernyataan dibawah ini:

Misi ke 5 Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berkesesuaian dengan kebijakan nomor 7 dari RTRW.

Tujuan penataan ruang merupakan arahan perwujudan ruang wilayah yang diinginkan pada masa yang akan datang. Secara keseluruhan, antara misi yang tertuang dalam RPJMD dengan tujuan penataan ruang dalam RTRW ada keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterkaitan secara langsung terutama pada aspek-aspek pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi dan bidang lingkungan hidup, sedangkan keterkaitan secara tidak langsung pada sosial budaya.

Program Dinas Perhubungan yang terkait secara langsung dengan RTRW adalah :

Pembangunan prasarana fasilitas perhubungan

Program Pembangunan Fasilitas Perhubungan khususnya untuk pembangunan dermaga akan menyebabkan alih fungsi hutan mangrove dan lahan pertanian sehingga memerlukan lahan pengganti non produktif untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian produktif. Pembangunan sarana transportasi laut memberikan dampak ekonomi positif, namun juga dampak negative mengurangi luas lahan pertanian. Kegiatan ini akan berdampak pada peningkatan emisi gas rumah kaca. Program ini perlu disertai dengan pembangunan ruang hijau disekitar dermaga. Dinas Perhubungan berperan aktif dalam pengaturan RTH di sekitar dermaga/pelabuhan yang akan dibuat.

Program ini juga berpengaruh langsung pada efek turunannya berupa, terbentuknya: komunitas urban city, pemukiman, fasilitas layanan publik, area perdagangan dan industry hilir, area pabrikasi, dll. Dampak lebih jauh: pembukaan

lahan tidak terkendali (alih fungsi lahan), aktivitas manusia dan produk industri yang akan menghasilkan limbah. Dinas Prasarana Jalan memastikan bahwa penunjukan lokasi dan pengembangan kawasan sudah termasuk dalam Tata Ruang.

Telaahan Renstra terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dari dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis, pada tabel 3.3 Identifikasi Pemangku Kepentingan, Dinas Perhubungan termasuk kepada SKPD yang Penting dan mempunyai kegiatan yang berpengaruh kepada lingkungan hidup.

Dan pada tabel 3.4 Analisis Pemangku Kepentingan, Dinas Perhubungan mendapat bobot 4 untuk SKPD yang mempunyai pengaruh besar terhadap RPJMD. Jadi dapat disimpulkan bahwa SKPD yang mendapat bobot besar dinilai memiliki dalam pelaksanaan KLHS RPJMD sehingga KRPNya akan dikaji lebih lanjut dari pelaksanaan KLHS RPJMD.

Dari Pelaksanaan identifikasi isu-isu dengan kelompok kerja didapatkan isu-isu panjang yang terkait dengan kegiatan Dinas Perhubungan antara lain seperti terlihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.4 Daftar isu panjang KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Barat yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan

No	Tema	Isu-isu Terkait
1.	Kualitas Udara	1. Peningkatan kebisingan akibat penambahan frekuensi penebangan
		2. Peningkatan kebisingan akibat reaktifasi moda kereta api
2.	Pesisir Laut dan Pantai	3. Belum adanya regulasi zonasi pesisir laut
3.	Transportasi	4. Kemacetan yang ditimbulkan oleh kegiatan pasar di ruas jalan nasional dan provinsi
		5. Kemacetan yang ditimbulkan oleh pertumbuhan pusat-pusat bangkitan dan tarikan
		6. Belum optimalnya pelayanan terminal angkutan umum.
		7. Banyaknya terminal bayangan
		8. Perlintasan kereta api tanpa palang/rambu-rambu
		9. Jalan raya banyak yang rusak karena muatan berlebih
		10. Belum optimalnya kualitas pelayanan angkutan umum
		11. Kemacetan di beberapa titik seperti Basko, Simpang Haru dan Padang Luar

Untuk itu di dalam penyusunan kegiatan di dalam dokumen Renstra perlu adanya kajian yang terkait kepada isu-isu yang ada dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis, agar nantinya dapat memberi solusi atau pemecahan masalah dari isu-isu tersebut.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari permasalahan-permasalahan yang ada, baik itu berkaitan dengan Pelayanan SKPD, sasaran jangka menengah, Renstra K/L serta RTRW dan KLHS, memunculkan permasalahan-permasalahan pokok yang perlu penyelesaian dan solusi untuk maksimalnya pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu ditetapkan isu strategis antara lain :

1. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana/infrastruktur serta pelayanan transportasi publik.
2. Tingginya angka kecelakaan kendaraan bermotor dan pelanggaran lalu lintas
3. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas
4. Tingginya tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor sehingga perlu pengendalian dan pengawasan yang intensif
5. Sarana dan Prasarana lalu lintas yang rawan pencurian dan pengrusakan, sehingga perlu peningkatan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya sarana dan prasarana lalu lintas untuk keselamatan, keamanan dan ketertiban lalu lintas.

3.6 Urusan Perhubungan dan Faktor Penghambat

1. Urusan Perhubungan

1. Masih rendahnya kualitas pelayanan transportasi, yang disebabkan oleh belum terbentuknya kelembagaan pelayanan transportasi yang baik, belum maksimalnya pemberian subsidi terhadap pelayanan transportasi.
2. Belum optimalnya pengawasan standar pelayanan transportasi serta belum memadainya kualitas SDM dalam perencanaan dan pengelolaan layanan transportasi.
3. Belum maksimalnya jangkauan pelayanan sarana transportasi dalam membangun konektivitas wilayah.
4. Belum semua daerah kab/kota memiliki transportasi publik, disamping itu belum adanya keterpaduan intra dan antar moda transportasi.
5. Masih tingginya angka kecelakaan lalin.
6. Masih belum terwujudnya transportasi yang ramah lingkungan.

2. Faktor Penghambat

- a. Topografi Sumatera Barat yang berbukit dan pegunungan maka mengakibatkan rawan kecelakaan agak tinggi, sehingga diperlukan sarana dan prasarana lalu lintas yang berkeselamatan.
- b. Prasarana lalu lintas yang sudah dipasang rawan dicuri atau dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
- c. Masih rendahnya anggaran untuk penyediaan prasarana lalu lintas.

Bab IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN



4.1. Visi dan Misi SKPD

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di Bidang Perhubungan yang terarah dan fokus kepada hasil yang akan dicapai

disusunlah Visi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

“ Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal dan Terpadu”.

Dan upaya untuk mewujudkan Visi tersebut adalah melalui 2 Misi, yaitu :

1. Meningkatkan Pembangunan dan mengoptimalkan Sarana Prasarana Transportasi yang Berkelanjutan
2. Mewujudkan Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Transportasi dengan cara meningkatkan Pelayanan, Fungsi Forum Koordinasi Lalu Lintas Angkutan & Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Transportasi

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Penetapan tujuan didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Secara lebih khusus sesuai dengan kewenangan yang ada pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, maka tujuan yang dicapai adalah :

1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan wilayah.
2. Meningkatkan Pelayanan Transportasi & Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Transportasi
3. Meningkatkan Kinerja Organisasi.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Keselamatan Transportasi
2. Meningkatnya Kinerja Organisasi

Tabel T.IV.C.24 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Indikator Kinerja tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun n					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Terwujudnya Keselamatan Transportasi	Rasio Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Sarana Perhubungan yang Berfungsi Baik	%	80	80	80	80	80	40,31
				Persentase Prasarana Perhubungan yang Berfungsi Baik	%	80	80	80	80	80	23,5
			Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	Jumlah Wilayah Terpencil yang Dapat Diakses	Trayek	2	2	2	2	2	2
				Jumlah Penambahan Penumpang Terangkut	Orang	16.210.982	17.710.982	19.210.982	20.710.982	17.066.368	18.341.368
			Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas	Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas	%	20	20	20	20	20	5,17
2.	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Meningkatnya Kualitas Percanaan dan Pelaporan Organisasi	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja			B	B	BB	BB	

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Untuk mewujudkan rencana pembangunan, disusunlah strategi sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan transportasi massal dalam rangka peningkatan daya saing daerah.
2. Membangun konektivitas wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, objek wisata dan simpul transportasi
3. Menciptakan integrasi antar dan intermoda
4. Penguatan peran pemerintah dalam penyelenggaraan transportasi
5. Menciptakan transportasi yang berkeselamatan dalam melaksanakan program pemerintah menuju Zero Accident.

6. Meningkatkan kualitas SDM, penggunaan teknologi informasi dalam penyediaan layanan publik
7. Membuka ruang partisipasi publik dalam peningkatan pelayanan

Kemudian ditetapkan arah kebijakan untuk sebagai berikut :

1. Pengembangan aksesibilitas pelayanan angkutan umum antar kota dalam propinsi, kawasan aglomerasi perkotaan dan pelayanan angkutan perintis pada daerah-daerah terpencil
2. Pengembangan jaringan dan prasarana pelayanan angkutan SDP
3. Pengembangan aksesibilitas layanan transportasi dalam mendukung pariwisata Sumbar
4. Pembangunan infrastruktur simpul/sistem jaringan transportasi antar dan intermoda
5. Pembangunan fasilitas keselamatan kereta api
6. Perbaikan kelembagaan dan standar pelayanan angkutan umum
7. Meningkatkan kompetensi SDM melalui diklat-diklat teknis
8. Peningkatan/pengembangan sistem perijinan
9. Peningkatan dan pengembangan fasilitas keselamatan LLAJ
10. Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada daerah *Black Area* dan *Black Spot*
11. Pemaduserasian program peningkatan keselamatan jalan dengan instansi terkait
12. Sosialisasi/advokasi keselamatan jalan
13. Pengawasan terhadap pelanggaran perizinan dan standar pelayanan
14. Peningkatan kualitas SDM pelayanan, peningkatan kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya
15. Pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
16. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik
17. Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date

Tabel 4.2
Strategi dan Kebijakan

Visi	Terwujudnya Pelayanan Transportasi, yang Handal dan Terpadu			
Misi	1. Meningkatkan pembangunan dan mengoptimalkan sarana prasarana Transportasi yang Berkelanjutan			
	2. Mewujudkan keamanan, keselamatan dan kenyamanan transportasi dengan meningkatkan Pelayanan, Fungsi Forum Koordinasi Lalu Lintas Angkutan & Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Transportasi			
No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan wilayah	Meningkatkan Fungsi Insfratraktur Perhubungan (Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas)	Percepatan pembangunan/pege mbangan transportasi dalam rangka peningkatan ekonomi dan daya saing daerah	Mengembangkan pelayanan angkutan umum antar kota dalam provinsi dan kawasan aglomerasi perkotaan
				Mengembangkan pelayanan angkutan perintis darat, laut dan perkeretaapian.
				Mengembangkan jaringan dan prasarana darat, laut dan perkeretaapian
			Peningkatan konektifitas wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, objek wisata dan simpul transportasi	Mengembangkan aksesibilitas layanan transportasi dalam mendukung pariwisata Sumbar
			Penguatan peran pemerintah dalam penyelenggaraan transportasi publik	Membangun infrastruktur simpul/sistem jaringan transportasi antar dan intermoda
				Meningkatkan kompetensi SDM penyelenggara transportasi
				Meningkatkan standar pelayanan angkutan umum
2.	Meningkatkan Pelayanan Transportasi & Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Transportasi.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Jasa Transportasi, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas yang Berkeselamatan	Peningkatan transportasi yang berkeselamatan dalam melaksanakan program pemerintah menuju <i>Zero accident</i>	Meningkatkan fasilitas keselamatan transportasi
				Meningkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas
				Memaduserasikan Program peningkatan keselamatan jalan dengan instansi terkait
				Meningkatkan pengawasan dan sosialisasi keselamatan transportasi
			Peningkatan kualitas SDM, penggunaan teknologi informasi dalam penyediaan layanan publik	Meningkatkan pelayanan dan kualitas SDM
				Mengembangkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
			Pembukaan ruang partisipasi publik dalam peningkatan pelayanan	Membangun sarana dan prasarana pelayanan publik

Bab V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator dan Pendanaan Indikatif



Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2021 dituangkan kedalam 11 Program yang terkait langsung dengan urusan. Yang terdiri dari 6 Program urusan Perhubungan.

Berdasarkan Visi, Misi, Kebijakan, Strategi dan Sasaran yang telah disusun untuk Rencana Pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021, perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja dari masing-masing program, seperti dapat dilihat pada Tabel 5.1 di bawah ini :

TABEL. T.IV.C.28 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR DAN PENDANAAN INDIKATIF

Organisasi / SKPD : 1.07.01. DINASPERHUBUNGAN

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output)	Lokasi	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
PERHUBUNGAN									20.488.000		21.469.000		22.990.000		24.874.000		26.922.000		29.148.000		
Meningkatkan Infrastruktur dan Pembiayaan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Meningkatnya kualitas Penatausahaan Keuangan	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1.07.1.07.01.01. 1.07.1.07.01.02.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan ADM Perkantoran SKPD		20%	2.190.000	40%	2.295.000	60%	2.457.400	80%	2.658.800	100%	2.877.700	100%	3.115.700	
					1.07.1.07.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Terlaksananya Jasa Surat menyurat	Padang	12 bulan	10.000	12 bulan	12.000	12 bulan	13.400	12 bulan	14.500	12 bulan	16.000	12 bulan	20.700	
					1.07.1.07.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah terbayarnya tagihan Rek. listrik, telp, air dan faximile	Padang	3 Rekening	260.000	3 Rekening	350.000	3 Rekening	400.000	3 Rekening	525.000	3 Rekening	550.000	3 Rekening	570.000	
					1.07.1.07.	Penyediaan Jasa Jaminan	Jumlah terbayarn	Padang	1 Rumah	35.000	1 Rumah jabatan	40.000	1 Rumah	44.000	1 Rumah	44.000	1 Rumah	46.000	1 Rumah	50.000	

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output)	Lokasi	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
					01.01.05	Barang Milik Daerah	ya tagihan pajak rumah dinas		jabatan					jabatan		jabatan		jabatan		jabatan		
					1.07.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Jumlah tersedianya tenaga kebersihan pengamanan dan sopir kantor	Padang	12 bulan	700.000	12 bulan	700.000	12 bulan	800.000	12 bulan	800.000	12 bulan	900.000	12 bulan	1.000.000		
					1.07.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Ketersediaan ATK Dinas	Padang	12 bulan	90.000	12 bulan	95.000	12 bulan	100.000	12 bulan	100.000	12 bulan	110.000	12 bulan	115.000		
					1.07.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Fotocopy Kantor & Pengadaaan	Padang	12 bulan	95.000	12 bulan	98.000	12 bulan	100.000	12 bulan	100.000	12 bulan	110.000	12 bulan	123.000		
					1.07.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah tersedianya Komponen Listrik/penerangan bangunan kantor Dinas	Padang	12 bulan	30.000	12 bulan	30.000	12 bulan	30.000	12 bulan	40.000	12 bulan	42.000	12 bulan	45.000		
					1.07.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan &	Padang	12 bulan	30.000	12 bulan	30.000	12 bulan	30.000	12 bulan	43.000	12 bulan	46.000	12 bulan	50.000		

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output)	Lokasi	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
							Perlengkapan Kantor														
					1.07.1.07.01.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Ketersediaan 2 Media Cetak dan buku bacaan/PERPU	Padang	12 bulan	25.000	12 bulan	25.000	12 bulan	25.000	12 bulan	40.000	12 bulan	42.000	12 bulan	45.000	
					1.07.1.07.01.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Ketersediaan Makanan Minum untuk Rapat	Padang	12 bulan	200.000	12 bulan	200.000	12 bulan	200.000	12 bulan	40.300	12 bulan	42.000	12 bulan	45.000	
					1.07.1.07.01.01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	Jumlah Pelaksanaan Rakor & Konsultasi dalam dan luar Daerah	Padang	12 bulan	500.000	12 bulan	500.000	12 bulan	500.000	12 bulan	615.000	12 bulan	670.000	12 bulan	720.000	
					1.07.1.07.01.01.25.	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Jumlah jasa informasi dokumenter dan Publikasi + Camera SKPD	Padang	12 bulan	30.000	12 bulan	30.000	12 bulan	30.000	12 bulan	36.000	12 bulan	37.000	12 bulan	40.000	
					1.07.1.07.01.01.26.	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Jumlah Pembinaan Ceramah agama & kesegaran jasmani	Padang	12 bulan	20.000	12 bulan	20.000	12 bulan	20.000	12 bulan	23.000	12 bulan	26.000	12 bulan	30.000	

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output)	Lokasi	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					1.07.1.07.01.02.30.	Penataan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah Arsip yang tertata dan terkelola / yg autentik	Padang	12 bulan	15.000	12 bulan	15.000	12 bulan	15.000	12 bulan	18.000	12 bulan	20.000	12 bulan	22.000	
					1.07.1.07.01.01.35.	Operasional Korp Musik	Jumlah Terdukungnya upacara-upacara dengan Ops. Korsik	Padang	12 bulan	150.000	12 bulan	150.000	12 bulan	150.000	12 bulan	220.000	12 bulan	220.000	12 bulan	240.000	
Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Kinerja Organisasi	Meningkatnya kualitas Penatausahaan Keuangan	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1.07.1.07.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Peningkatan Sarana & Prasarana		20%	962.400	40%	1.008.500	60%	1.079.900	80%	1.168.400	100%	1.264.600	100%	1.369.200	
					1.07.1.07.01.02.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess	Jumlah terpeliharanya alat perabot rumah tangga jabatan dinas	Padang	12 bulan	45.400	12 bulan	50.000	12 bulan	50.000	12 bulan	50.000	12 bulan	59.600	12 bulan	64.200	
					1.07.1.07.1.07.	Pemeliharaan Rutin/Berkala	Jumlah terpelihar	Padang	12 bulan	85.000	12 bulan	90.000	12 bulan	100.000	12 bulan	100.000	12 bulan	110.000	12 bulan	120.000	

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output)	Lokasi	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					01.02.21.	Gedung Kantor	anyanya Gedung Kantor														
					1.07.1.07.01.02.23.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah terjaminnya mobilitas Kendaraan Operasional	Padang	12 bulan	145.000	12 bulan	150.000	12 bulan	155.900	12 bulan	160.000	12 bulan	170.000	12 bulan	180.000	
					1.07.1.07.01.02.25.	Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur	Jumlah terpeliharanya Mobiler Dinas	Padang	12 bulan	10.000	12 bulan	12.000	12 bulan	15.000	12 bulan	15.000	12 bulan	20.000	12 bulan	25.000	
					1.07.1.07.01.02.26.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Padang	12 bulan	38.000	12 bulan	40.000	12 bulan	45.000	12 bulan	45.000	12 bulan	50.000	12 bulan	55.000	
					1.07.1.07.01.02.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Jumlah Terpelihara alat instalasi listrik, air, Tlp Kantor	Padang	12 bulan	24.000	12 bulan	24.500	12 bulan	25.000	12 bulan	25.000	12 bulan	30.000	12 bulan	35.000	
					1.07.1.07.01.02.19.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Jumlah terawat dan terpeliharanya Komputer dan Jaringan komputerisasi	Padang	12 bulan	10.000	12 bulan	12.000	12 bulan	14.000	12 bulan	14.000	12 bulan	20.000	12 bulan	25.000	

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output)	Lokasi	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					1.07.1.07.01.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Jumlah terawat dan terpeliharanya Komputer dan Jaringan komputerisasi	Padang	12 bulan	10.000	12 bulan	10.000	12 bulan	15.000	12 bulan	15.000	12 bulan	20.000	12 bulan	20.000	
					1.07.1.07.01.02.29	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Jumlah Pengelola an Pengawasan Aset dan pengendalian Aset Daerah	Padang	12 bulan	20.000	12 bulan	20.000	12 bulan	30.000	12 bulan	30.000	12 bulan	30.000	12 bulan	35.000	
					1.07.1.07.01.02.48.	Pembangunan garase dan Parkir Mobil	Jumlah tempat parkir sepeda motor	Padang	1 lapangan	75.000		-	1 lapangan	75.000	1 lapangan	75.000	1 lapangan	85.000	1 lapangan	90.000	
						Pengadaan Meubeleu	Jumlah meubeleu r yang tersedia	Padang			3 meja kantor, 3 kursi kerja	100.000	12 bulan	30.000	12 bulan	40.000	12 bulan	70.000	12 bulan	100.000	
						Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Jumlah terpenuhinya komputer kantor dlm melaksanakan kelancaran tugas	Padang	12 bulan	50.000	12 bulan	50.000	12 bulan	20.000	12 bulan	30.000	12 bulan	50.000	12 bulan	70.000	
						Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasi	Jumlah tersedia ya Mobil	Padang	1 unit	450.000	1 unit	450.000	1 unit	450.000			1 unit	550.000	1 unit	550.000	

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
						onal	Dinas															
						Pengadaan Timbangan Portable	Tersedianya perlengkapan operasional Dinas	Sumbar		-		-	1 unit	55.000								
						Pengadaan Kendaraan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara gabungan	Tersedianya kendaraan operasional pemeriksaan gabungan	Sumbar		-		-		1 unit	569.400							
Meningkatkan Infrastruktur dan Pemakaian yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatkannya Kinerja Organisasi	Meningkatnya kualitas Penatausahaan Keuangan	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1.07 .1.0 7.01 .03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin pegawai		20%	147.000	40%	154.000	60%	164.900	80%	178.500	100%	193.200	100%	209.100		
						Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Terlaksananya pengendalian intern pemerintah pada Instansi Perhubungan	Sumbar			1 dokumen	44.000	1 dokumen	50.000	1 dokumen	55.000	1 dokumen	60.000	1 dokumen	65.000		

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					1.07.1.07.01.03.01.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah terpenuhi Pakaian Dinas (PDH)	Padang	280 orang	147.000	180 orang	100.000	245 orang	103.900	245 orang	112.500	250 orang	133.200	250 orang	144.100	
						Pengadaan Mesin Absensi	Tersedianya Fasilitas Mesin Absensi	Padang			2 unit	10.000	2 unit	11.000	2 unit	11.000					
Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Kinerja Organisasi	Meningkatnya kualitas Penatausahaan Keuangan	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1.07.1.07.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Sumber Daya Aparatur		20%	100.000	40%	104.800	60%	112.200	80%	121.400	100%	131.400	100%	142.300	
					1.07.1.07.01.05.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi, Bimtek, Implementasi Perpu	Padang	12 bulan	100.000	12 bulan	104.800	12 bulan	112.200	12 bulan	121.400	12 bulan	131.400	12 bulan	142.300	
Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatkan Kinerja Organisasi	Meningkatnya kualitas Penatausahaan Keuangan	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1.07.1.07.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Layanan Program dan Keuangan		20%	415.000	40%	434.900	60%	465.700	80%	503.800	100%	545.300	100%	590.400	

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output)	Lokasi	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
dan Berwawasan Lingkungan																					
					1.07.1.07.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah tersedianya masukan yg lengkap bagi pimpinan daerah utk mengukur capaian kinerja OPD	Padang	12 bulan	40.000	12 bulan	41.900	12 bulan	50.700	12 bulan	63.800	12 bulan	70.300	12 bulan	75.400	
					1.07.1.07.01.06.03	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran OPD	Jumlah tersusunnya Perencanaan dan Penganggaran OPD	Padang	12 bulan	40.000	12 bulan	15.000	12 bulan	20.000	12 bulan	25.000	12 bulan	35.000	12 bulan	45.000	
					1.07.1.07.01.06.04	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan OPD	Jumlah hasil pengawasan dan Lap. Program Kegiatan OPD	Padang	12 bulan	75.000	12 bulan	150.000	12 bulan	155.000	12 bulan	160.000	12 bulan	170.000	12 bulan	185.000	
					1.07.1.07.01.06.05	Penatausahaan Keuangan OPD	Jumlah tertatanya sistem keuangan OPD	Padang	12 bulan	260.000	12 bulan	228.000	12 bulan	240.000	12 bulan	255.000	12 bulan	270.000	12 bulan	285.000	
Meningkatkan	Terwujud	Indeks Fatalita	Menurunnya	Persentase	1.07.1.0	Program Peningkatan	Persentase		20%	210.000	40%	220.000	60%	235.600	80%	255.000	100%	275.900	100%	298.800	100%

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output)	Lokasi	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode			
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
Pembangunan dan Mengoptimalkan Sarana Prasarana Transportasi yang Berkelanjutan Mewujudkan Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Transportasi dengan cara meningkatkan Pelayaran, Fungsi Forum Koordinasi Lalu Lintas Angkutan & Peran Serta Masyarakat	ny Keslamatan Transpor	s Kecelakaan lalu Lintas	Pelanggaran Lalu Lintas	Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas	7.01 .28.	dan Pengamanan Lalulintas	Sarana Keselamatan Lalulintas Jalan																	
								1.07.1.07.01.28.01.	Penyuluhan / sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Perubahan perilaku masyarakat dan pelajar dalam berlalu lintas menjadi lebih baik	Sumbar	36 Org peserta, 10 Sekolah	150.000	36 Org peserta, 10 Sekolah	160.000	40 Org peserta, 10 Sekolah	160.000	40 Org peserta, 10 Sekolah	183.000	40 Org peserta, 10 Sekolah	196.900	40 Org peserta, 10 Sekolah	211.000	100%
								1.02.09.01.019.008	Pengadaan dan mesangan prasarana lalu lintas pendukung Musabah Tilawatil Qura'an (MTQ)	Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas bagi pengguna jalan	Sumbar								1 Paket	250.000	-	-	100%	
								1.02.09.01.019.007	Penilaian Andalalin di Jalan Provinsi Sumbar	Dokumen Hasil Analisis dampak lalu lintas	Sumbar		-		-		-	1 dokumen	50.000	1 dokumen	50.000	1 dokumen	50.000	100%
								1.07.1.07.01.28.09.	Monitoring dan Pembinaan Penyelenggaraan Angkutan Perintis	Terlaksananya Monitoring dan Pembinaan Angkutan Perintis	Sumbar	1 laporan	60.000	1 laporan	60.000	1 laporan	66.000	1 laporan	72.000	1 laporan	79.000	1 laporan	87.000	100%
						Evaluasi dan Monitoring	Persentase	Sumbar				1 laporan	125.00	1 laporan	137.50	1 laporan	150.00	1 laporan	165.0	100%				

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output)	Lokasi	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
akut dalam Penyelenggaraan Transportasi						Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	penurunan emisi gas rumah kaca bidang transportasi rumah kaca						0		0		0		00		
Meningkatkan Pembangunan dan Mengoptimalkan Sarana Prasarana Transportasi yang Berkelanjutan	Terwujudnya Keselamatan Transportasi	Indeks Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Prasarana Perhubungan Yang Befungsi Baik	1.07.1.07.01.29.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Pembangunan prasarana dan fasilitas Transportasi Darat dan Laut		20%	7.386.850	40%	7.740.000	60%	8.288.700	80%	8.968.100	100%	9.706.400	100%	10.509.000	100%
					1.07.1.07.01.29.01.	Pengadaan dan Pemasangan (rambu, rarka, guardrail, delimitator, cermin tikungan, traffic light dan ZoSS) Sarana Perlengkapan Jalan	Persentase Tersedianya perlengkapan jalan pada ruas jalan provinsi di Sumatera Barat	Sumbar	100%	2.509.623	13,16 %	2.500.000	18,42 %	3.500.000	21,05 %	4.000.000	23,68 %	4.500.000	23,68 %	4.500.000	100%

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output)	Lokasi	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					1.07.1.07.01.29.02.	Pemeliharaan/perawatan (Rambu,marka guardrail,deliniator dan traffic light) sarana perlengkapan jalan	Persentase Meningkatnya fungsi perlengkapan jalan	Sumbar	100%	300.000	4 paket	300.000	4 paket	330.000	4 paket	363.000	4 paket	400.000	4 paket	400.000	100%
					1.07.1.07.01.29.03.	Pengadaan dan Pemasangan Prasarana Lalu Lintas Pendukung Tour de Singkarak	Persentase Tersedianya fasilitas pendukung untuk kelancaran penyelenggaraan Tour De Singkarak	Sumbar	100%	400.000	1 paket	400.000	1 paket	400.000	1 paket	450.000	1 paket	450.000	1 paket	450.000	100%
					1.07.1.07.01.29.04.	Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan DAK Sub Sektor Perhubungan Darat pada Kab/Kota	Jumlah hasil monitoring dan pembinaan pelaksanaan DAK	Sumbar	1 laporan	60.000	1 laporan	460.000	1 laporan	466.000	1 laporan	472.000	1 laporan	579.800	1 laporan	588.000	100%
					1.07.1.07.01.29.05.	Pengadaan dan Pemasangan RPPJ (Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan) di Sumatera Barat	Jumlah Tersedianya RPPJ di Sumbar	Sumbar	8 buah	100.000	8 buah	100.000	10 buah	120.000	10 buah	125.000	10 buah	125.000	10 buah	130.000	100%

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output)	Lokasi	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					1.07.1.07.01.29...	Pengadaan Dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Dan Fasilitas Transportasi Perkotaan	Tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan Dan Fasilitas Transportasi Perkotaan	Sumbar	100%	4.017.227	3 paket	-	3 paket	-	3 paket	-	3 paket	-	3 paket	-	100%
Meningkatkan Pembangunan dan Mengoptimalkan Sarana Prasarana Transportasi yang Berkelanjutan	Terwujudnya Keselamatan Transportasi	Indeks Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Prasarana Perhubungan Yang Befungsi Baik	1.07.1.07.01.37	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian	Jumlah MRL pada Perlintasan Sebidang Jalan KA dengan Jalan		20%	5.300.000	40%	1.480.800	60%	1.585.700	80%	1.715.700	100%	1.856.900	100%	2.010.500	100%
					1.07.1.07.01.37.01.	Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRL) Perlintasan sebidang jalan Kereta Api pada ruas jalan di Sumatera Barat	Jumlah paket MRL pada perlintasan sebidang yang terpasang	Perlintasan Sebidang di Sumbar	3 paket	200.000	1 Paket	500.000	1 Paket	750.000	1 Paket	750.000	1 Paket	800.000	1 Paket	1.000.000	100%
					1.07.1.07.01.37.02.	Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Kereta Api Duku-BIM	Jumlah pjl Ketersediaan Lahan	Sumbar	4.2 km	5.000.000	4,2 Km	350.000	4,2 Km	350.000							100%

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output)	Lokasi	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
							untuk jalur KA Bandara														
					1.07.1.07.01.37.03.	Sosialisasi Keselamatan Kereta Api	Jumlah peserta yg melaksanakan Sosialisasi	Sumbar	50 org	100.000	1 Paket	200.000	1 Paket	200.000	1 Paket	250.000	1 Paket	250.000	1 Paket	300.000	100%
					1.02.09.01.093.0004	Pengumpulan dan analisis data angkutan kereta api di sumbar	Terlaksananya pengumpulan data dan analisis angkutan kereta api di sumbar	Sumbar	-	-	1 Dokumen	80.000	1 Dokumen	80.000	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000	100%	100%	
					1.02.09.01.021.006	Investigasi kecelakaan kereta api dan inventarisasi keselamatan kereta api	Terlaksananya data investigasi dan inventarisasi data keselamatan kereta api	Sumbar	-	-	-	-	1 Paket	100.000	1 Paket	100.000	100%	100%			
						Monitoring Pelayanan Angkutan Kereta Api perintis Di sumbar	Terlaksananya pengawasan pelayanan angkutan KA Perintis di Sumbar	Sumbar	-	-	-	-	1 Dokumen	60.000	1 Dokumen	85.000	100%	100%			
						Fasilitasi/Dukungan Pengembangan	Jumlah kegiatan Fasilitasi/Dukungan		-	430.800	1 paket	285.700	1 paket	715.700	1 paket	806.900	1 paket	710.500	100%	100%	

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output)	Lokasi	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
						Pembangunan Sarana Prasarana Kereta Api Sumatera Barat	Pengembangan/ Pembangunan Sarana Prasarana KA															
Meningkatkan Penggunaan dan Mengoptimalkan Sarana Prasarana Transportasi yang Berkelanjutan	Terwujudnya Keselamatan Transportasi	Indeks Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Umum	Jumlah wilayah terpencil yang dapat Diakses	1.07.1.07.01.31.	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	Prosentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut		20%	480.000	40%	503.000	60%	538.600	80%	582.700	100%	630.700	100%	682.900	100%	
					1.07.1.07.01.31.01.	Penyusunan UKL-UPL Pengembangan Pelabuhan	Jumlah Tersusunnya Dokumen UKL-UPL Kab. Kep. Pengembangan Pelabuhan	Kab. Kep. Mentawai	1 Dokumen	250.000		-		-		-		-		-	100%	
						Penyusunan dlkr/dlcp Pelabuhan Tua Pejat	Jumlah Tersusunnya Dokumen dlkr/dlcp pelabuhan tua pejat	Kab. Kep. Mentawai				-		-		-		-		1 Dokumen	600.000	

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output)	Lokasi	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
						Penyusunan Dokumen DED Pengembangan Pelabuhan Tua Pejat	Adanya Dokumen DED Pengembangan pelabuhan Tua Pejat	Kab. Mentawai		-		-		-	1 dokumen	700.000		-		-	
					1.02.09.01.022.013	Evaluasi dan monitoring Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau Di Sumbar	Terlaksananya Pendataan Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai	Kab. Mentawai					1 Laporan	80.000	1 laporan	80.000	1 Laporan	90.000	1 Laporan	95.000	100%
						Penyusunan Dokumen Lingkungan Tua Pejat dan Sinakak	Tersedianya dokumen Lingkungan Tua Pejat	Kab. Mentawai	-		-		-		-		-		1 dokumen	700.000	
						Pengawasan dan Pembinaan pelabuhan di Prov. Sumbar	Tersedianya data Pelabuhan dan SDM Pengelola Pelabuhan		-		-		1 Laporan	150.000	1 Laporan	180.000	1 Laporan	200.000	1 Laporan	200.000	
						Pengawasan Pelayanan Angkutan Penyeberangan perintis dan Angkutan Pelayaran Rakyat Disumbar	Tertibnya Pelayanan Angkutan Penyeberangan Perintis dan Angkutan Pelayara						1 Laporan	100.000	1 Laporan	125.000	1 Laporan	125.000	1 Laporan	150.000	

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output)	Lokasi	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
							n Rakyat Di Sumbar															
						Evaluasi dan Pembinaan Perusahaan jasa penunjang angkutan laut	Adanya Perusahaan yang tertib pelayanan dan tertib administrasi									1 Laporan	50.000	1 laporan	50.000			
					1.07.1.07.01.31.03.	Penyusunan Data Base Angkutan Laut	Jumlah Tersusun nya Data Base Angkutan Laut	Padang	1 Paket	103.050	1 Paket	43.000		-		-		-		-		100%
					1.07.1.07.01.31.04.	Pengawasan Pelayanan Angkutan Laut Perintis	Jumlah trayek yang diawasi melayani angkutan kapal perintis	Padang, Kab.Pessei, Mentawai	2 Trayek	46.950	1 Laporan	77.000	1 Laporan	80.000	1 Laporan	80.000	1 Laporan	85.000	1 Laporan	85.000		100%
					1.07.1.07.01.31.05.	Pelatihan SAR dalam rangka siap siaga bencana	Jumlah adanya tenaga profesional penanggulangan bencana	Padang	30 Orang	55.000		-	30 Orang	75.000			30 Orang	75.000				100%
					1.07.1.07.01.31.06.	Pembinaan tentang Keselamatan Pelayaran Kab/Kota se Sumbar	Jumlah Kab/Kota yang dibina tentang Kespel	Sumbar	6 Kab/Kota	20.000	6 Kab/Kota	35.000	6 Kab/Kota	40.000	6 Kab/Kota	45.000	6 Kab/Kota	50.000	6 Kab/Kota	55.000		100%

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output)	Lokasi	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					1.07.1.07.01.31.07.	Pemeliharaan Peralatan SAR	Prosentase terpeliharanya peralatan SAR Dishubko minfo Sumbar	Padang	100%	5.000	-	-	100%	15.000	100%	20.000	100%	25.000	100%	25.000	100%
						Subsidi Kapal Penumpang Trayek Padang – Mentawai	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi laut	Padang dan Kab. Kep. Mentawai		-	1 Tahun	3.525.000	1 Tahun	4.000.000	1 Tahun	4.500.000	1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	5.000.000	100%
						Pemeliharaan Sistem Informasi Data Base Angkutan Laut	Pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana	Padang		-	1 Paket	43.000	1 Paket	50.000	1 Paket	55.000	1 Paket	60.000	1 Paket	60.000	100%
Meningkatkan Pembangunan dan Mengoptimalkan Sarana Prasarana Transportasi yang Berkelanjutan	Terwujudnya Keselamatan Transportasi	Indeks Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Prasarana Perhubungan yang Berfungsi Baik	1.07.1.07.01.32.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Rehab dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Transportasi (Darat, Udara)		20%	359.039	40%	4.449.100	60%	4.764.300	80%	5.154.800	100%	5.579.000	100%	6.040.500	100%
					1.07.1.07.01.32.01.	Pemeliharaan/Perawatan Gedung Jembatan	Jumlah terpeliharanya fasilitas	Sumbar	9 JT	284.039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output)	Lokasi	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
						Timbang	sarana dan prasarana yang memadai di JTO														
					1.07.1.07.01.32.02.	Pemeliharaan X-Ray Fasilitas Kespem Embarkasi haji	Jumlah Terlaksana pemeliharaan X-Ray asrama haji	Asrama haji	2 Unit	75.000	1 Paket	100.000	1 Paket	150.000	1 Paket	175.000	1 Paket	200.000	1 Paket	200.000	100%
					1.07.1.07.01.32.03.	Pengadaan X-Ray untuk Embarkasi Haji Baru			-		-	2 Paket	3.414.000		-		-		-		100%
						Peningkatan Fasilitas Terminal Type B Pada Kabupaten / Kota	Persentase Terminal Type B yang meningkat fungsinya	Sumbar		-	1 paket	4.349.100	1 paket	1.200.000	1 paket	4.979.800	1 paket	5.379.200	1 paket	5.840.500	100%
Meningkatkan Pemanaan dan Mengoptimalkan Sarana Prasarana Transportasi yang Berkelanjutan	Terwujudnya Keselamatan Transportasi	Indeks Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Sarana Perhubungan yang Berfungsi Baik	1.07.1.07.01.32.03.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase terpenuhinya Frekuensi Pelayanan Angkutan/Transportasi (Darat, Laut dan Udara)		20%	2.938.100	40%	3.078.700	60%	3.296.900	80%	3.567.100	100%	3.860.700	100%	4.180.000	100%

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					1.07.1.07.01.33.01.	Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum	Jumlah peserta Terwujudnya disiplin berlalu lintas di jalan	Padang	40 org pengemudi Ka/kota	82.826	54 org pengemudi Ka/kota	175.000	54 org pengemudi Ka/kota	200.000	54 org pengemudi Ka/kota	225.000	54 org pengemudi Ka/kota	250.000	54 org pengemudi Ka/kota	275.000	100%
					1.07.1.07.01.33.02.	Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dengan Instansi Terkait	Jumlah titik pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dengan instansi terkait	Sumbar	6 Titik Rauas	700.280	9 Titik Ruas	1.200.000	10 Titik Ruas	1.300.000	10 Titik Ruas	1.350.000	10 Titik Ruas	1.400.000	10 Titik Ruas	1.450.000	100%
					1.07.1.07.01.33.03.	Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan Jalan	Jumlah Tersusunnya data base Angkutan Jalan	Padang	1 Dokumen	175.000	1 Dokumen	200.000	-	-	-	-	1 Dokumen	200.000	-	-	100%
					1.07.1.07.01.33.04.	Sosialisasi Penertiban Berat Muatan dan Dimensi Angkutan Barang	Jumlah menurunnya pelanggaran dimensi dan lebih muatan oleh kendaraan angkutan barang	Padang	50 orang	35.000	50 orang	60.000	50 orang	65.000	50 orang	70.000	50 orang	75.000	50 orang	80.000	100%

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output)	Lokasi	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					1.07.1.07.01.33.05.	Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT)	Jumlah Terbinanya awak kendaran umum	Padang	36 penge mudi angkutan orang/b arang 2 orang ke TK. Nasional	150.000	36 pengemudi angkutan orang/barang 2 orang ke TK. Nasional	200.000	36 penge mudi angkutan orang/b arang 2 orang ke TK. Nasional	225.000	36 penge mudi angkutan orang/b arang 2 orang ke TK. Nasional	250.000	36 penge mudi angkutan orang/b arang 2 orang ke TK. Nasional	250.000	36 penge mudi angkutan orang/b arang 2 orang ke TK. Nasional	250.000	100%
					1.07.1.07.01.33.07.	Perawatan Sistem Informasi Perizinan Angkutan Umum (SIMPAU)	Jumlah rawatan alat Sistem Informasi Perizinan Angkutan Umum (SIMPAU)	Padang	1 paket	40.000	1 Paket	40.000	1 Paket	50.000	1 Paket	55.000	1 Paket	66.000	1 Paket	73.000	100%
						Pembinaan/pemilihan Unit Penguji Kendaraan Bermotor Teladan	Jumlah terbinanya unit PKB terbaik/teladan	Padang dan Jakarta			18 kab/kota se-Sumatera Barat dan 1 unit PKB ke tk Nas	75.000	18 kab/kota se-Sumatera Barat dan 1 unit PKB ke tk Nas	100.000	18 kab/kota se-Sumatera Barat dan 1 unit PKB ke tk Nas	125.000	18 kab/kota se-Sumatera Barat dan 1 unit PKB ke tk Nas	135.000	18 kab/kota se-Sumatera Barat dan 1 unit PKB ke tk Nas	150.000	100%

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output)	Lokasi	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					1.07.1.07.01.33.09.	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Terpilihnya Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas yang peduli terhadap keselamatan lalu lintas angkutan jalan	Padang dan Jakarta	30 pelajar SLTA, 2 orang ke Tk Nasional	120.000	30 pelajar SLTA, 2 orang ke Tk Nasional	175.000	30 pelajar SLTA, 2 orang ke Tk Nasional	200.000	30 pelajar SLTA, 2 orang ke Tk Nasional	225.000	30 pelajar SLTA, 2 orang ke Tk Nasional	235.000	30 pelajar SLTA, 2 orang ke Tk Nasional	250.000	100%
					1.07.1.07.01.33.10.	Pembinaan dan Pengawasan Bengkel Karoseri Industri Kendaraan Bermotor	Jumlah Terbinanya dan terawasanya bengkel karoseri industri kendaraan bermotor	Padang dan Jakarta	25 orang pengusaha bengkel karoseri	40.000	25 Orang Pengusaha Bengkel Karoseri	50.000	25 Orang Pengusaha Bengkel Karoseri	60.000	25 Orang Pengusaha Bengkel Karoseri	70.000	25 Orang Pengusaha Bengkel Karoseri	80.000	25 Orang Pengusaha Bengkel Karoseri	100.000	100%
					1.07.1.07.01.33.11.	Rapat Koordinasi Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi teknis pengujian	Padang dan Jakarta	50 orang penguji	50.000	1 X Rapat (50 Orang Pengujian Sumbar) 2 x tk Nas	60.000	1 X Rapat (50 Orang Pengujian Sumbar) 2 x tk Nas	70.000	1 X Rapat (50 Orang Pengujian Sumbar) 2 x tk Nas	80.000	1 X Rapat (50 Orang Pengujian Sumbar) 2 x tk Nas	90.000	1 X Rapat (50 Orang Pengujian Sumbar) 2 x tk Nas	100.000	100%

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output)	Lokasi	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					1.07.1.07.01.33.12.	Forum Komunikasi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Lalu Lintas Angkutan Umum Prov.Sumbar	Jumlah pelaksanaan forum komunikasi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Lalu lintas angkutan jalan Prov. Sumbar	Padang dan Jakarta	60 orang / 4xkegiatan	52.775	60 orang / 4xkegiatan	76.000	60 orang / 4xkegiatan	85.000	60 orang / 4xkegiatan	100.000	60 orang / 4xkegiatan	110.000	60 orang / 4xkegiatan	120.000	100%
					1.07.1.07.01.33.13.	Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah pelaksanaan forum lalu lintas angkutan jalan di Prov. Sumbar	Sumbar	100 orang / 6x kegiatan	83.568	100 orang / 6x kegiatan	143.000	100 orang / 6x kegiatan	150.000	100 orang / 6x kegiatan	165.000	100 orang / 6x kegiatan	175.000	100 orang / 6x kegiatan	185.000	100%
					1.07.1.07.01.33.14.	Pemeriksaan Perizinan Kendaraan Angkutan Penumpang Umum di Terminal tipe A dan B / di jalan	Jumlah terlaksananya pemeriksaan perizinan kendaraan angkutan penumpang umum di terminal tipe A dan B / jalan	Sumbar	3 terminal / 2x kegiatan	200.000	12 terminal / 2x kegiatan	900.000	12 terminal / 2x kegiatan	1.000.000	12 terminal / 2x kegiatan	1.100.000	12 terminal / 2x kegiatan	1.200.000	12 terminal / 2x kegiatan	1.300.000	100%

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output)	Lokasi	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					1.07.1.07.01.33.15.	Pemeriksaan perizinan/ketentuan tata cara pemuatan, daya angkut dan dimensi kendaraan angkutan barang di jembatan timbang	Jumlah Terlaksananya perizinan / ketentuan tata cara pemuatan, daya angkut dan dimensi kendaraan angkutan barang di jembatan timbang	Sumbar	5 JTO / 1x kegiatan	128.377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
					1.07.1.07.01.33.16.	Satuan Tugas Pengawasan Bermotor di jalan (STPJ)	Jumlah Terlaksananya tugas-tugas operasional STPJ Dishubko minfo Prov Sumbar	Sumbar	30 org petugas khusus pengamanan jalan	100.000	40 org petugas khusus pengamanan jalan	150.000	50 org petugas khusus pengamanan jalan	200.000	12 Bulan	220.000	12 Bulan	240.000	12 Bulan	260.000	100%
					1.07.1.07.01.33.17.	Investigasi kecelakaan dan investigasi daerah rawan longsor dan bencana alam	Jumlah titik Terupdate nya daerah rawan kecelakaan lalu lintas, longsor dan bencana	Sumbar	Sesuai Titik kejadian Ruas jalan Prov./Nasional	30.000	Sesuai Titik kejadian Ruas jalan Prov./Nasional	65.000	Sesuai Titik kejadian Ruas jalan Prov./Nasional	85.000	Sesuai Titik kejadian Ruas jalan Prov./Nasional	100.000	Sesuai Titik kejadian Ruas jalan Prov./Nasional	100.000	Sesuai Titik kejadian Ruas jalan Prov./Nasional	120.000	100%

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output)	Lokasi	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
							alam															
					1.07.1.07.01.33.18.	Optimalisasi pemakaian kendaraan derek	Jumlah terbantuan ya kasus kecelakaan utk mendukung kelancaran lalu lintas mendukung Kelancaran arus lalu lintas	Sumbar	24 kali	50.000	50 kali	120.000	50 kali	135.000	12 bulan	150.000	12 bulan	175.000	12 bulan	200.000		100%
						Pemeliharaan Billboard Keselamatan	Terpeliharanya Billboard Keselamatan	Ruas Jalan Prov/Nasional			3 paket	100.000	3 paket	110.000	3 paket	125.000	3 paket	135.000	3 paket	150.000		100%
						Audit Keselamatan Jalan	Menurunnya Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Ruas Jalan Prov/Nasional			5 Titik	250.000	5 Titik	350.000	5 Titik	375.000	5 Titik	400.000	5 Titik	425.000		100%
					1.07.1.07.01.33.19.	Pengawasan Pelaksanaan Operasional Jembatan Timbang	Meningkatkan pelayanan pengawasan kendaraan angkutan	Sumbar	UPTD dan 9 (sembilan) JT di Sumatera Barat	120.310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		100%

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output)	Lokasi	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
							barang yang optimal, terciptanya aparatur yang bersih dan berwibawa														
						Pemeriksaan Laik Jalan Angkutan Penumpang Umum	Tercapainya Kenyamanan dan Keselamatan di Jalan	Terminal Type B / Jalan kab/kota se sumbar			8 lokasi terminal tipe B	100.000	8 lokasi terminal tipe B	125.000	8 lokasi terminal tipe B	135.000	8 lokasi terminal tipe B	145.000	8 lokasi terminal tipe B	150.000	100%
		Meningkatnya Aksesibilitas Pelayanan Transportasi Umum	Jumlah pelayanan angkutan udara untuk keselamatan penerbangan	1.07.1.07.01.33.23.	Dukungan Embarkasi Haji tentang Keselamatan Penerbangan	Terlaksananya pelayanan yang baik bagi calon jamaah haji	Sumbar	5900 org	205.000	5.900 Orang	300.000	4.900 Orang	310.000	6.000 Orang	325.000	6.000 Orang	350.000	6.000 Orang	350.000	100%	
				1.07.1.07.01.33.24.	Pengawasan dan Pembinaan Bandara di Sumatera Barat	Jumlah Bandara yg diawasi dan dibina di Sumatera Barat	Sumbar	3 Bandara	75.000	1 Dokumen / Laporan	100.000	1 Dokumen/ Laporan	135.000	1 Dokumen/ Laporan	135.000	1 Dokumen/ Laporan	150.000	1 Dokumen/ Laporan	150.000	100%	
					Sosialisasi Keselamatan Transportasi haji untuk	Meningkatnya Pengetahuan							4 Kab/kota	70.000	4 Kab/kota	80.000		-		100%	

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output)	Lokasi	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
						Para Calon Jemaah Haji	Jemaah Calon Haji Tentang keselamatan														
					1.07.1.07.01.33.25.	Pengawasan Penerbangan Angkutan Udara Perintis dari/ke Bandara Internasional Minangkabau	Jlh rute yg diawasi menggunakan angkutan udara perintis	Pasbar, Rokot, Ma. Bungo	5 Rute	75.000	6 Rute	100.000	7 Rute	155.000	8 Rute	175.000	8 Rute	175.000	9 Rute	200.000	100%
					1.07.1.07.01.33.26.	Pengawasan dan Penerbitan Perusahaan-perusahaan Kargo di Sumatera Barat	Jumlah Tertibnya usaha kargo administrasi dan layanannya di Kab/Kota	Sumba	7 Kab / Kota	40.000	20 Perusahaan	50.000	7 Perusahaan	75.000	25 Perusahaan	100.000	30 Perusahaan	150.000	35 Perusahaan	160.000	100%
					1.07.1.07.01.33.27.	Pembuatan Database Sektor Perhubungan Udara	Jumlah tersedia data yang bisa diakses masyarakat	BIM, Rokot, Pasbar	1 paket	85.000	1 Paket	50.000				-		-		-	100%
					1.07.1.07.01.33.28.	Pemeliharaan Database Sektor Perhubungan Udara	Terpeliharanya System Data Base	Padang		-		-	1 Paket	50.000	1 Paket	75.000	1 Paket	75.000	1 Paket	100.000	100%
					1.07.1.07.01.33.29.	Kajian Pembukaan Rute Internasional dari/ke BIM	Terlaksananya penerbangan Internasional			-		-	1 Paket	250.000		-		-		-	100%

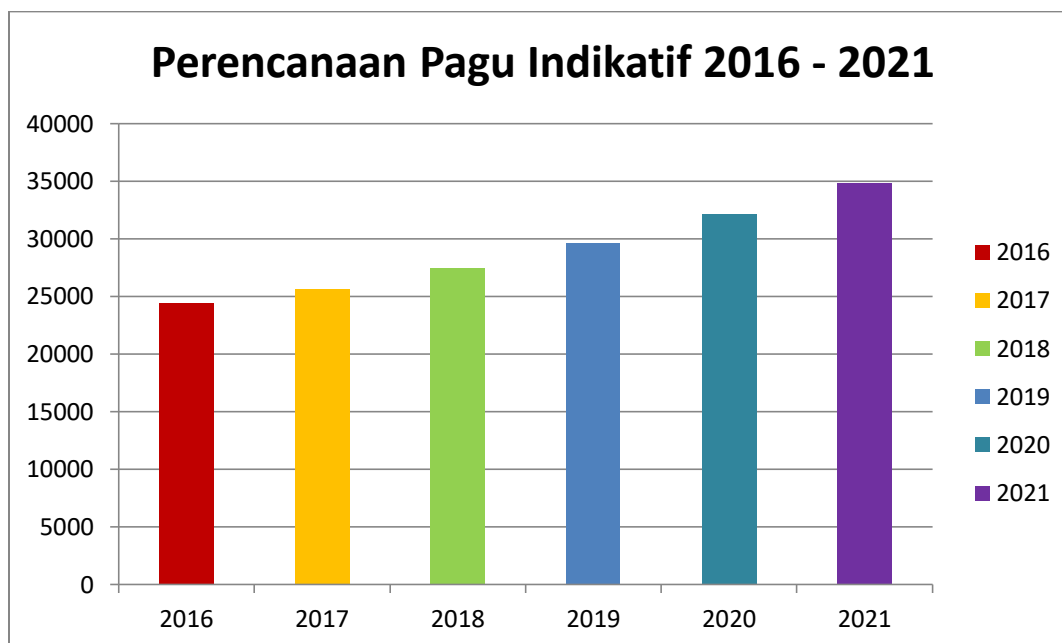
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					1.07.1.07.01.33.30.	Sosialisasi untuk standarisasi Heliport	Jumlah data tentang pengawasan pemantauan bangunan Heliport di Sumatera Barat			-		-	1 Dokumen/Laporan	150.000		-		-		-	100%
					1.07.1.07.01.33.31.	Pengawasan dan Pembinaan Heliport di Sumatera Barat	Jumlah Heliport yang ada di Sumatera Barat			-		-		1 Dokumen/Laporan	175.000	1 Dokumen/Laporan	175.000	1 Dokumen/Laporan	250.000	100%	
					1.07.1.07.01.33.28.	Penghargaan Wahana Tata Nugraha	Jumlah Terpilihnya kota-kota penerima penghargaan wahana tata nugraha	Sumbar	13 Kab/Kota	200.000	13 Kab/Kota	200.000	14 Kab/Kota	220.000	14 Kab/Kota	230.000	14 Kab/Kota	240.000	14 Kab/Kota	250.000	100%
					1.02.09.01.017.035	Penyediaan Pelayanan angkutan pekan nasional Tani dan Nelayan Tahun 2020	Tersedianya Sarana Transportasi Bagi Tamu Undangan Penastani	Sumbar		-		-		-		-	Gubernur/Keua DPRD/Tamu Prov. Se Indonesia	945	Gubernur/Keua DPRD/Tamu Prov. Se Indonesia	1.600.000	100%

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
						Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Pengoperasian terminal Type B	Kelancaran kerja dalam pelayanan Angkutan di terminal type B	5 terminal type B		-		-		-		-	12 Bulan	7.000	-	-	100%
						Studi Implementasi Keterterminal Type B Rawamangun dan ke terminal Tirtonadi Solo	Untuk Peningkatan Pelayanan di terminal type B di Sumatera Baarat	Rawamangun dan Solo		-		-		-		-	1 Tahun	70.000	-	-	100%
						Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke XXVII tahun 2020	Tersedianya Sarana Transportasi Bagi Tamu undangan Harganas tahun 2020											-	Gubernur/Keua DPRD/Tamu Prov. Se Indonesia	900.000	100%
						Penyediaan Pelayanan Angkutan MTQ ke XXVIII	Tersedianya Sarana Transportasi Bagi Tamu undangan MTQ tahun 2020											Gubernur/Keua DPRD/Tamu Prov. Se Indonesia	1.900.000		100%

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output)	Lokasi	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
						Buku Statistik Perhubungan	Tersedianya Buku Statistik Perhubungan					100 buku	30.000	100 buku	30.000	90 buku	30.000	85 buku	40.000	100%	
					1.07.1.07.01.33.29.	Pemantauan Angkutan Lebaran	Persentase Pengawasan pemantauan angkutan lebaran	Sumbar	18 Kab/Kota	100.000	18 Kab/Kota	100.000		18 Kab/Kota	50.000	18 Kab/Kota	50.000		-	100%	
						Akreditasi Unit Pelaksana uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terakreditasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	13 Unit Pengujian Kendaraan Bermotor di sumbar						13 Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	70.000	13 Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	70.000	13 Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	70.000	100%	
						Monitoring dan Pembinaan Penyelenggaraan Operasional Terminal Type B	Jumlah Hasil Monitoring / Pembinaan Terminal Type B	Sumbar		-	8 Kab/Kota	100.000	8 Kab/Kota	110.000	5 Terminal	120.000	5 Terminal	130.000	5 Terminal	140.000	100%
						Pembinaan Pengusaha Angkutan Umum	Jumlah Peserta Pengusaha Angkutan Umum yang terbina	Sumbar		-		-	50 orang	200.000		-	50 orang	200.000		-	100%
						Peningkatan Kapasitas dan Peran Forum	Terwujudnya keselamatan	SUmbar								12 Bulan	800.000	1.200.000	12 bulan	100%	

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output)	Lokasi	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
						Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PHJD)	an Jalan														
						Pengumpulan dan analisis data volume lalu lintas jalan	Jumlah Tersusun nya data base Volume lalu lintas jalan	Sumbar		-		-	1 paket	200.000		-		-	1 paket	300.000.	100%

Dari tabel T.IV.C.28 terlihat perkiraan pagu indikatif Dinas Perhubungan meningkat setiap tahunnya. Hal ini dengan asumsi kenaikan kebutuhan pembiayaan dan fluktuasi harga BBM, harga barang dan komoditi setiap tahunnya. Perkiraan kenaikan cukup signifikan, yaitu sekitar 5 % setiap tahunnya.



Bab VI

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD



Dari 10 Prioritas Pembangunan Daerah 2016 – 2021, yang sangat terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat adalah prioritas ke 9 yaitu **Pengembangan Energi dan Pembangunan Infrastruktur**

Untuk mewujudkan Visi RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sesuai prioritas, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat ditargetkan untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja seperti Tabel di bawah ini:

TABEL. T.IV.C.29 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode (2021)
			Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	6	7	8	9	11
1	Penumpang terangkut transportasi publik (org/Th)							
	- Darat	7,11	0,01	8,55	22,31	29,91	36,51	42,71
	- Laut	2,50	0,05	7,10	7,50	10,25	12,51	15,31
	- Udara	2,04	0,02	4,05	6,12	8,16	10,20	12,23
	- SDP	4,10	0,04	8,16	12,30	16,40	20,50	24,60
- KA	6,66	0,13	17,57	19,98	26,64	33,30	39,99	
2	Rasio Angka Kecelakaan	2,70	2,71	2,71	2,70	2,69	2,68	2,67

Bab VII

Penutup

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat dan Kepala Daerah untuk rentang waktu 5 tahun kedepan.

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan khususnya di sektor transportasi, serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan bagi seluruh unit kerja dan stakeholder sektor transportasi. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dengan sebaik-baiknya.
2. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 s/d 2021.
3. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat berkewajiban menjaga konsistensi antara Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat
4. Unit Kerja lingkup Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat berkewajiban untuk melaksanakan RENSTRA ini sesuai dengan yang termuat di dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan Provinsi Sumatera Barat.